

**PARTISIPASI KELOMPOK TANI HUTAN LAGOLLA DALAM
PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN (HKm)
DESA ANABANUA KABUPATEN BARRU**

SKRIPSI

**MUH YUSRIL YUNUS
105951100419**

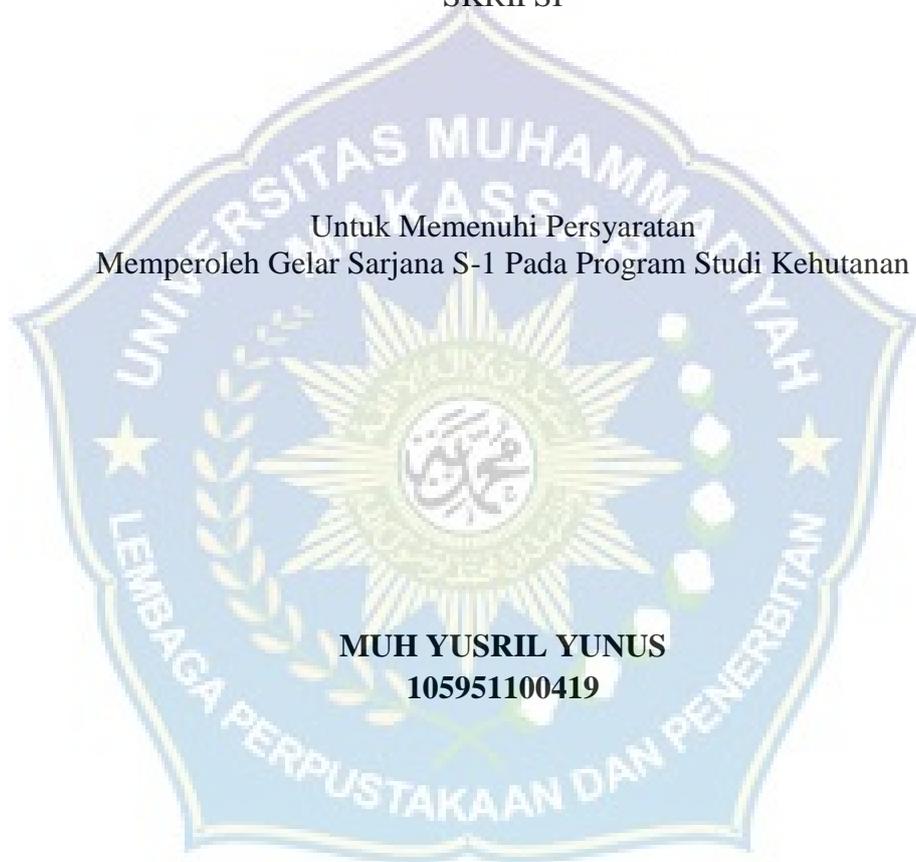


**PROGRAM STUDI KEHUTANAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2023**

**PARTISIPASI KELOMPOK TANI HUTAN LAGOLLA DALAM
PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN (HKm)
DESA ANABANUA KABUPATEN BARRU**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana S-1 Pada Program Studi Kehutanan



**MUH YUSRIL YUNUS
105951100419**

**PROGRAM STUDI KEHUTANAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Partisipasi Kelompok Tani Hutan LaGolla dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Desa Anabanua, Kabupaten Barru

Nama : Muh Yusril Yunus

Nim : 105951100419

Program Studi : Kehutanan

Fakultas : Pertanian

Makassar, Agustus 2023

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Dosen pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Ir. Hasanuddin Molo, S.Hut., M.P., IPM., CEIA.
NIDN. 0907028202


Ir. Jauhar Mukti, S.Hut., M.Hut., IPM.
NIDN. 0921029002

Diketahui oleh :

Dekan Fakultas Pertanian

Ketua Program Studi



Dr. Ir. Andi Khaeriyah, M.Pd., IPU.
NIDN. 0926036803



Dr. Ir. Hikmah, S.Hut., M.Si., IPM.
NIDN. 0011077101

HALAMAN KOMISI PENGUJI

Judul : Partisipasi Kelompok Tani Hutan LaGolla dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Desa Anabanua, Kabupaten Barru.

Nama : Muh Yusril Yunus

Nim : 105951100419

Program Studi : Kehutanan

Fakultas : Pertanian

Pembimbing I

Dr. Ir. Hasanuddin Molo, S.Hut., M.P., IPM., CEIA.
NIDN. 0907028202

(.....)

Pembimbing II

Ir. Jauhar Mukti, S.Hut., M.Hut., IPM.
NIDN. 0921029002.

(.....)

Penguji I

Dr. Ir. Irma Sribianti, S.Hut., M.P., IPM.
NIDN. 0007017105

(.....)

Penguji II

Andi Aziz Abdullah, S.Hut., M.P.
NIDN. 0930106701

(.....)

Tanggal Lulus : 22 Agustus 2023

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER DATA

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : “Partisipasi Kelompok Tani Hutan LaGolla dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Desa Anabanua, Kabupaten Barru”.

Adalah benar merupakan hasil karya sendiri yang belum diajukan dalam bentukapa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Semua sumber data dan informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir skripsi.

Makassar, Agustus 2023

Muh Yusril Yunus

ABSTRAK

MUH YUSRIL YUNUS (105951100419), Partisipasi Kelompok Tani Hutan (KTH) LaGolla dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Desa Anabanua, Kabupaten Barru, di bawah Bimbingan **Hasanuddin Molo** dan **Jauhar Mukti**.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dan tingkat Partisipasi Kelompok Tani Hutan (KTH) LaGolla dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Desa Anabanua, Kecamatan barru, Kabupaten Barru. Penelitian ini dilakukan mulai dari 20 juni 2023 sampai dengan 29 Agustus 2023, dengan menggunakan metode wawancara dan survey lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk dan tingkat partisipasi keputusan, partisipasi pelaksanaan, partisipasi pemanfaatan, dan partisipasi evaluasi di Desa Anabanua, Kabupaten Barru memiliki nilai skor berkisar 2,77- 2,91 , sehingga masuk pada kategori tingkat partisipasi tinggi. Pada tingkat Partisipasi Keputusan memperoleh nilai sebesar 2,91 (tinggi), Partisipasi Pelaksanaan dengan nilai 2,90 (tinggi), Partisipasi Pemanfaatan dengan nilai 2,77 (tinggi), Partisipasi Evaluasi dengan nilai 2,84 (tinggi).

Bentuk partisipasi dalam kegiatan partisipasi keputusan pada Kelompok Tani Hutan (KTH) LaGolla dapat dilihat pada kegiatan dalam musyawarah atau dalam pembuatan program kerja yang menjadi kepentingan bersama, Partisipasi pelaksanaan dapat dilihat pada kegiatan suatu program yang telah dimulai sebelumnya baik dari segi perencanaan, pelaksanaan seperti penanaman dan pemeliharaan. Partisipasi pemanfaatan dapat dilihat pada produk yang dihasilkan salah satu produk yang dihasilkan seperti madu alam. Partisipasi evaluasi dengan pelaksanaan program yang telah direncanakan sebelumnya seperti pembibitan, penanaman, pemanenan, dan pemanfaatan.

Kata kunci : *Partisipasi Kelompok Tani Hutan, Hutan Kemasyarakatan, Tingkat Partisipasi Masyarakat.*

ABSTRACT

MUH YUSRIL YUNUS (105951100419), Participation of the LaGolla Forest Farmers Group (KTH) in Community Forest Management (HKm) of Anabanua Village, Barru District, under the Guidance of **Hasanuddin Molo** and **Jauhar Mukti**.

This study aims to determine the form and level of participation of the LaGolla Forest Farmers Group (KTH) in Community Forest Management (HKm) of Anabanua Village, Barru District, Barru District. This research was conducted from 20 June 2023 to 29 August 2023, using interview and field survey methods.

The research results show that the shape and level of decision participation, implementation participation, utilization participation, and evaluation participation in Anabanua Village, Barru Regency has a score ranging from 2.77 to 2.91, so it is included in the high participation level category. At the Decision Participation level, a value of 2.91 (high), Implementation Participation with a value of 2.90 (high), Utilization Participation with a value of 2.77 (high), Evaluation Participation with a value of 2.84 (high).

The form of participation in decision participation activities in the LaGolla Forest Farmers Group (KTH) can be seen in activities in deliberations or in making work programs of common interest. and maintenance. Utilization participation can be seen in the products produced, such as natural honey. Participate in evaluation by implementing previously planned programs such as nursery, planting, harvesting and utilization.

Keywords: *Participation of Forest Farmer Groups, Community Forestry, Level of Community Participation.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat Rahmat dan KaruniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan judul “Partisipasi Kelompok Tani Hutan LaGolla Dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Desa Anabanua, Kabupaten Barru ”.

Tidak lupa pula kita kirimkan salam dan shalawat kepada junjungan kita baginda Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam, beliau yang menjadi surih tauladan bagi kita umat beragama. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, mengenai isi maupun penulisnya, sehingga penyusun memohon kritikan yang bersifat membangun. Mudah-mudahan laporan ini bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua.

Dengan segala kerendahan hati, Tidak lupa saya ucapkan terimakasih kepada yang sebesar - besarnya kepada ;

1. Kedua orang tua tercinta, tak henti-hentinya memanjatkan doa untuk keberhasilan dan keselamatan penulis dunia akhirat, kemudian dukungan moral serta materi demi keberhasilan Pendidikan penulis.
2. Dr. Ir. Hikmah, S.Hut., M.Si., IPM. Selaku Ketua Prodi Kehutanan Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan masukan kepada penulis.
3. Dr. Ir. Hasanuddin Molo, S.Hut., M.P., IPM., CEIA. Selaku Pembimbing I dan Ir. Jauhar Mukti, S.Hut., M.Hut., IPM. Selaku Pembimbing II yang telah

memberikan masukan terhadap penyusunan serta pengetahuan dan motivasinya.

4. Dr. Ir. Irma Sribianti, S.Hut., M.P., IPM. selaku penguji I dan Andi Aziz Abdullah, S.Hut., M.P. selaku penguji II yang telah memberikan masukan, arahan, terhadap penyusunan serta pengetahuan dan motivasinya.
5. Bapak dan Ibu Dosen Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan ilmu selama penulis menempuh Pendidikan.
6. Bapak dan ibu UPT KPHL Unit II Ajatappareng yang memberikan bantuan dan pengetahuan baik langsung maupun tak langsung.

Makassar, Agustus 2023

Muh Yusril Yunus

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN KOMISI PENGUJI	iv
PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER DATA	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	3
II. TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Perhutanan Sosial	4
2.2 Hutan Kemasyarakatan (HKm).....	6
2.3 Kelompok Tani Hutan (KTH).....	9
2.4 Partisipasi	12
2.5 Kerangka Pikir	14
III. METODE PENELITIAN	15
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	15
3.2 Objek Penelitian	15
3.3 Alat dan Bahan	15
3.4 Sampel Penelitian.....	16
3.5 Pengumpulan Data	16
3.5.1 Jenis dan Sumber Data.....	16
3.5.2 Teknik pengumpulan data.....	16

3.6 Analisis Data	17
3.7 Variabel Penelitian	20
IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	22
4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian	22
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	22
4.1.2 Responden Berdasarkan Tingkat Umur.....	23
4.1.3 Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	24
4.2 Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm).25	
4.2.1 Partisipasi Keputusan.....	25
4.2.2 Partisipasi Pelaksanaan.....	31
4.2.3 Partisipasi Pemanfaatan.....	36
4.2.4 Partisipasi Evaluasi.....	41
4.3 Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm).....	46
V. PENUTUP.....	50
5.1 Kesimpulan	50
5.2 Saran	50
DAFTAR PUSTAKA.....	52
LAMPIRAN.....	56

DAFTAR TABEL

Nomor	Teks	Halaman
1.	Tingkat Partisipasi Masyarakat	19
2.	Variabel, Definisi dan Indikator.....	20
3.	Partisipasi Masyarakat Dalam Mengadakan Pertemuan Atau Rapat Kerja	26
4.	Partisipasi Masyarakat Dalam Memberikan Usulan Pada Saat Rapat	27
5.	Partisipasi Masyarakat Dalam Menyampaikan Masalah Dalam Kegiatan	27
6.	Partisipasi Masyarakat Dalam Menyampaikan Masalah Dalam Kegiatan	28
7.	Partisipasi Masyarakat Dalam Menghadiri Pertemuan	29
8.	Rekapitulasi Partisipasi Keputusan	30
9.	Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Kegiatan.....	32
10.	Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Yang Dirapatkan	32
11.	Partisipasi Masyarakat Dalam Pengadaan Bibit	33
12.	Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Penanaman Bibit.....	34
13.	Partisipasi Masyarakat Dalam Pengamanan Areal Hutan.....	34
14.	Rekapitulasi Partisipasi Pelaksanaan	35
15.	Partisipasi Masyarakat Dalam Pembukaan Wilayah Hutan.....	37
16.	Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Penetapan Petak Kerja	37
17.	Partisipasi Masyarakat Dalam Mengambil Tumbuhan Obat	38
18.	Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Rencana Kerja	39
19.	Partisipasi Masyarakat Dalam Menjalankan Program Kerja	39

20. Rekapitulasi Partisipasi Pemanfaatan	40
21. Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Yang Telah Direncanakan	42
22. Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Persiapan Lahan Pemanenan	43
23. Partisipasi Masyarakat Dalam Melakukan Pemeliharaan Penanaman.....	44
24. Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pemanenan.....	44
25. Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pasca Panen	45
26. Rekapitulasi Partisipasi Evaluasi	45
27. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm).....	47



DAFTAR GAMBAR

Nomor	Teks	Halaman
1.	Kerangka Pikir	15
2.	Jumlah Penduduk	22
3.	Responden Berdasarkan Tingkat umur	24
4.	Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	24
5.	Partisipasi keputusan.....	25
6.	Partisipasi pelaksanaan.....	31
7.	Pemanfaatan Madu Alam.....	36
8.	Partisipasi Evaluasi	42



DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Teks	Halaman
1.	SK IUPHKm Kelompok Tani Hutan (KTH) LaGolla	56
2.	Daftar Nama Anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) LaGolla	61
3.	Susunan Struktur Kelompok Tani Hutan (KTH) LaGolla	66
4.	Kusioner Penelitian	68
5.	Skor Partisipasi keputusan	74
6.	Skor Partisipasi pelaksanaan	76
7.	Skor Partisipasi Pemanfaatan	78
8.	Skor Partisipasi Evaluasi	80
9.	Dokumentasi Penelitian	82
10.	Surat Izin Penelitian	87
11.	Surat Keterangan Bebas Plagiat	88
12.	Peta Lokasi Penelitian	94
13.	RIWAYAT HIDUP	95

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hutan merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat yang hidup di sekitarnya. Hubungan interaksi antara masyarakat desa hutan dengan lingkungan alam sekitarnya telah berlangsung selama berabad-abad lamanya secara lintas generasi dalam bingkai keseimbangan kosmos. Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan di setiap masyarakat desa hutan mempunyai ciri khas tersendiri (*local spesific*) sesuai dengan karakteristik budaya masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan. Sumberdaya hutan dimaknai sebagai sumberdaya alam yang memiliki nilai ekonomi, religius, politik, sosial dan budaya. Oleh karena itu, kelangsungan hidup dari masyarakat dan hutan sangat tergantung dari ketersediaan sumberdaya hutan yang ada di sekitar lingkungannya (Nugraha, 2005).

Menurut PermenLHK No. 09 Tahun 2021 adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau Masyarakat Hukum Adat (MHA) sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA) dan kemitraan kehutanan. Kegiatan-kegiatan tersebut juga mencakup sistem kegiatan pengembangan dan pengelolaan hutan yang dikelola oleh pemiliknya sendiri yang dibantu oleh tenaga ahli kehutanan untuk melaksanakan prinsip-prinsip kehutanan (Departemen Kehutanan, 1987) dalam Yunasfi (2007).

Salah satu bentuk kehutanan sosial inisiatif pemerintah adalah program Hutan Kemasyarakatan (HKm). HKm adalah suatu program di mana masyarakat diberi hak kelola atas lahan hutan negara. Kegiatan Perhutanan Sosial (social forestry) didefinisikan sebagai bentuk kehutanan industrial (konvensional) yang dimodifikasi untuk memungkinkan distribusi keuntungan kepada masyarakat lokal (Gilmour dan Fisher, 1991 dalam Suharjito dan Darusman, 1998).

Kabupaten Barru adalah salah satu kabupaten di Sulawesi selatan yang telah melaksanakan program Hutan Kemasyarakatan (HKm). Berdasarkan fungsinya, luas kawasan hutan yang potensial dikelola sebagai wilayah pengelolaan HKm di kabupaten barru adalah 68.179 ha dari total kawasan hutan yang terdiri atas 16.913 ha kawasan hutan produksi terbatas dan seluas 51.266 ha kawasan hutan lindung. Kawasan hutan tersebut tersebar di beberapa kecamatan yaitu Pujananting, Mallusetasi, Tanete Rilau, Barru, Balusu, Soppeng Riaja, dan Tanete Riaja. (Dinas Kehutanan Kabupaten Barru, 2017).

Kelompok Tani Hutan (KTH) LaGolla merupakan salah satu kelompok yang berada di Desa Anabanua, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, kelompok tani hutan (KTH) laGolla terbentuk pada tanggal 22 februari 2013 kemudian diberikan Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) dari MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA dengan Nomor :SK.6895/MENLHK-PSKL/PSL.0/12/2017 pada tanggal 22 desember 2017 dengan jumlah anggota 187 orang dengan luas \pm 345 hektar pada Kawasan hutan lindung di Desa Anabanua, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan. Peneliti ini tertarik melakukan

penelitian tentang partisipasi Kelompok Tani Hutan (KTH) La Golla dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Anabanua, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk dan tingkat Partisipasi Kelompok Tani Hutan LaGolla Dalam Pengelolaan Hutan Desa Anabanua, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru.?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bentuk dan tingkat Partisipasi Kelompok Tani Hutan LaGolla Dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Desa Anabanua, Kecamatan barru, Kabupaten Barru.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai sumber informasi kepada para pihak terkait maupun para pembaca terkait tentang bentuk dan tingkat Partisipasi Kelompok Tani Hutan LaGolla Dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Desa Anabanua, Kecamatan barru, Kabupaten Barru.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perhutanan Sosial

Sejak perhutanan sosial ditetapkan menjadi program nasional dari tahun 2014 kebijakan ini cukup banyak mendapatkan perhatian dari banyak kalangan terutama dari pemerintah, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak lain. Perhutanan sosial saat ini menjadi salah satu kebijakan strategis dibidang kehutanan yaitu sebagai sebuah program pemberdayaan masyarakat untuk pengentasan kemiskinan melalui distribusi pengelolaan kawasan hutan kepada masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan (Supriyanto dkk., 2017).

Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial adalah menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 247 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial telah dijabarkan ke dalam serangkaian peraturan menteri yang mengakomodir pengelolaan hutan oleh masyarakat seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013, bahwa hutan sebagai sumberdaya alam memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat, manfaat baik secara langsung, maupun manfaat tidak langsung. Manfaat langsung hutan antara

lain menghasilkan kayu untuk keperluan pertukangan maupun bahan pulp dan kertas, tempat hidup satwa, dan lain-lain. Manfaat tidak langsung digunakan sebagai tempat ekowisata dan penyedia oksigen. Keberhasilan pengelolaan hutan tidak terlepas dari peranan masyarakat yang berada disekitar hutan. Dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan rakyat, maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik, dan kerentanannya, serta tidak diperbolehkan mengubah fungsi utamanya (Mitchell dkk., 2003).

Jangka waktu izin perhutanan sosial selama 35 tahun maka masyarakat memerlukan pendampingan yang memadai dan berkelanjutan dalam mendukung kemandirian kelompok untuk mencapai tujuan perhutanan sosial yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan (Ekawati, 2020).

Berdasarkan Pasal 204 PP No.23 Tahun 2021 Pengelolaan Perhutanan Sosial ini terdiri atas:

- a. Hutan Desa adalah Kawasan Hutan yang belum dibebani izin, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.
- b. Hutan Kemasyarakatan adalah Kawasan Hutan yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan Masyarakat.
- c. Hutan Tanaman Rakyat (HTR) adalah Hutan tanaman pada Hutan Produksi yang dibangun oleh kelompok Masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas Hutan Produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya Hutan.

- d. Hutan Adat merupakan merupakan hutan yang berada di wilayah Masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya.
- e. Kemitraan Kehutanan adalah kerja sama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan/jasa hutan, izin pinjam pakai Kawasan hutan, atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan.

Sebagai upaya mendukung program perhutanan sosial saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah membuat program pendampingan terhadap kelompok penerima persetujuan Perhutanan Sosial yang diatur pada Peraturan Menteri LHK No. 9 Tahun 2021 perubahan peraturan Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan No. 1 Tahun 2019. Pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan kepada masyarakat/kelompok Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial untuk pengelolaan hutan lestari dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Menteri LHK, 2021).

2.2 Hutan Kemasyarakatan (HKm)

Hutan Kemasyarakatan (HKm) merupakan salah satu skema yang dibangun dalam program perhutanan sosial (Puspasari dkk., 2017). Tujuan adanya skema HKm adalah untuk pemberdayaan masyarakat sekitar hutan (Safe'i dkk., 2018). Peraturan Pemerintah No 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan menyebutkan bahwa untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil, dilakukan pemberdayaan masyarakat setempat, melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraannya. Salah satu

bentuk pemberdayaan masyarakat setempat dapat dilakukan salah satunya melalui Hutan Kemasyarakatan (HKm). Penyelenggaraan HKm dimaksudkan untuk memberikan akses (Arifin 2006; Arifin dkk., 2009) dan mengembangkan kapasitas masyarakat sekitar hutan dalam mengelola hutan secara lestari guna menjamin ketersediaan lapangan kerja untuk memecahkan persoalan ekonomi dan sosial yang terjadi di masyarakat (Dwiprabowo dkk., 2013).

Hutan Kemasyarakatan (HKm) menjadi salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan untuk menekan laju deforestasi di Indonesia dengan melibatkan masyarakat di samping Hutan Desa dan Hutan Tanaman Rakyat. Banyak pihak memandang kebijakan ini sebagai pengakuan negara terhadap pengelolaan hutan oleh rakyat yang selama ini terabaikan, namun mampu menjaga kelestarian alam dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Bagi masyarakat, hutan tak hanya memiliki makna ekologis, tetapi juga sosial, budaya dan ekonomi (Khaeruddin, 2018). Hutan kemasyarakatan merupakan hutan negara dengan sistem pengelolaan hutan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat tanpa mengganggu fungsi pokoknya. Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan nilai ekonomi, nilai budaya, memberikan manfaat/benefit kepada masyarakat pengelola, dan masyarakat setempat. Hutan Kemasyarakatan ditujukan atau bisa dimanfaatkan oleh masyarakat petani di sekitar kawasan hutan yang memiliki ketergantungan pada kawasan hutan tersebut dengan sistem pendekatan areal kelola/hamparan kelola. Dalam hal ini, Hutan Kemasyarakatan memberikan kepastian hukum atas status lahan kelola bagi masyarakat yang membutuhkannya. Hutan Kemasyarakatan

juga bertujuan agar hutan lestari masyarakat sejahtera. Konsep Hutan Lestari melalui pola-pola pengelolaan di lahan HKm diharapkan dapat dinikmati oleh masyarakat sehingga meningkatkan kesejahteraan hidup mereka & melalui penganekaragaman hasil dari tanaman yang ditanam di lahan HKm, (Hakim dkk., 2010).

PermenLHK No. 09 Tahun 2021 tentang Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan yang diberikan kepada perorangan, kelompok tani atau koperasi masyarakat setempat dengan mengutamakan pengelolaan dengan areal Kawasan hutan lindung. Izin Usaha Pemanfaatan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) diberikan dalam jangka 35 tahun dan diperpanjang sesuai hasil evaluasi setiap 5 tahun. Tujuan dari kegiatan pemberdayaan masyarakat setempat atau masyarakat sekitar hutan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, baik itu meningkatkan nilai ekonomian, nilai budaya, serta meningkatkan manfaat-manfaat atau keuntungan yang akan di dapatkan masyarakat pengelola dan masyarakat setempat. (Suradireja dkk., 2018).

Menurut Waznah (2006) hutan kemasyarakatan memberikan manfaat, baik bagi masyarakat, pemerintah maupun bagi hutan, yaitu:

1. Bagi fungsi hutan

- a. Fungsi ekologi mensyaratkan hutan harus tetap berfungsi sebagai sistem penyangga kehidupan dari berbagai jenis plasma nutfah asli, baik flora maupun fauna, serta melestarikan ekosistem dan spesies unik yang mungkin ditemukan dalam hutan.

- b. Fungsi ekonomi diupayakan berfungsi sebagai penyangga keberlanjutan sistem produksi, konservasi dan pendaya-manfaatan kekayaan yang terkandung di dalamnya serta untuk berbagai penggunaan lainnya secara terpadu.
 - c. Fungsi sosial budaya diupayakan untuk semakin melibatkan peran serta masyarakat, terutama masyarakat sekitar kawasan hutan.
2. Bagi masyarakat, HKm dapat memberikan kepastian akses untuk turut mengelola kawasan hutan, menjadi sumber mata pencarian, dan menjamin ketersediaan air yang dapat dimanfaatkan untuk rumah tangga dan pertanian.
 3. Bagi pemerintah, HKm dapat meningkatkan hubungan yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. HKm juga berdampak positif pada pengamanan hutan.

Hutan Kemasyarakatan bertujuan dalam pemanfaatan sumberdaya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Salah satu hutan negara yang ditetapkan sebagai areal kerja HKm yaitu hutan lindung (Winarni dkk., 2016).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pengelolaan Hutan meliputi kegiatan: (1) tata guna dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, (2) pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, (3) rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan (4) perlindungan hutan.

2.3 Kelompok Tani Hutan (KTH)

Pengelolaan HKm merupakan salah satu bentuk nyata partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kehutanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sagita dkk., 2019).

Menurut Safe'i dkk., (2018) bahwa hutan kemasyarakatan merupakan suatu program pemanfaatan sumberdaya hutan yang selalu mengutamakan pada aspek keberlanjutan. Program hutan kemasyarakatan ini ditujukan dengan tujuan untuk dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat dengan melalui proses pemanfaatan sumberdaya hutan secara adil, optimal, dan berkelanjutan.

Areal kerja Hutan Kemasyarakatan adalah satu kesatuan hamparan kawasan hutan yang dapat dikelola oleh kelompok atau gabungan kelompok masyarakat setempat secara lestari yang memegang IUPHKm pada hutan lindung maupun IUPHKm pada hutan produksi. Dalam PERMENLHK No. 83 Tahun 2016 dikatakan bahwa Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat IUPHKm merupakan izin usaha yang diberikan kepada kelompok atau gabungan kelompok masyarakat setempat untuk memanfaatkan hutan pada kawasan hutan lindung dan atau kawasan hutan produksi.

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 83 Tahun 2016 Hutan Kemasyarakatan merupakan hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat. Rahmina dkk (2012) juga menyebutkan Hutan Kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat, dengan sasaran adalah kawasan hutan lindung dan hutan produksi belum dibebani hak

pengelolaan atau izin pemanfaatan menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat; serta izin diberikan kepada “Kelompok Masyarakat Setempat”.

Kelompok tani merupakan suatu sistem lembaga yang berisi aturan-aturan yang disetujui oleh para anggotanya. Pembentukan kelompok tani adalah upaya untuk mengkoordinir individu-individu untuk bekerja sama mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Kelompok tani berfungsi sebagai wadah belajar, diskusi, pertemuan, pengumpulan informasi dan berbagi pengalaman antar anggota kelompok. Kelembagaan masyarakat semacam kelompok tani adalah sebagai 12 salah satu wadah yang diselenggarakan petani untuk mengembangkan usaha taninya.

Menurut Permenhut No. 57 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Hutan, Kelompok Tani Hutan merupakan kumpulan petani atau perorangan warga negara Indonesia berserta keluarganya yang mengelola usaha di bidang kehutanan di dalam dan di luar kawasan hutan yang meliputi usaha hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan, baik di hulu maupun di hilir.

Menurut Swadaya (1988) dalam Suratiyaningrum (2013) sebagai perkumpulan orang disekitar hutan, Kelompok tani hutan mempunyai tujuan, sebagai berikut:

1. Membina dan mengembangkan usaha anggota di bidang seperti proses produksi, pengelolaan, dan pemasaran hasil usaha,
2. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota,

3. Ikut serta membangun dan melestarikan hutan melalui kerjasama dengan Perum Perhutani,
4. Memberikan pelayanan/menyalurkan kepada anggota yang menyangkut kebutuhan,
5. Usaha produktif, misalnya dalam hal usaha tani seperti pupuk, insektisida, dan alat-alat pertanian,
6. Meningkatkan kesejahteraan anggota, merupakan tujuan akhir terbentuknya Kelompok Tani Hutan.

2.4 Partisipasi

Partisipasi masyarakat sangat penting karena merupakan cara untuk memperoleh informasi tentang status, kebutuhan dan sikap masyarakat terhadap suatu program, masyarakat akan merasa bertanggung jawab dan menjamin keberlanjutannya. Partisipasi aktif masyarakat berperan penting dalam keberhasilan suatu program pemerintah. Salah satu cara penerapan pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat yaitu dengan menumbuhkan efisiensi dalam pemanfaatan pengelolaan sumber daya alam (Lombok dkk., 2021). Berdasarkan pada faktor-faktor pendorong partisipasi masyarakat menjadi tolak ukur keberhasilan program. Dengan pelibatan secara penuh kepada masyarakat dan tanggung jawab maka program bisa berjalan dengan stabil dan sebaliknya. Selain itu, prinsip partisipasi menuntut keaktifan masyarakat anggota pelaksana pengelolaan hutan berbasis masyarakat untuk memperhatikan aspek ekologi, ekonomi dan sosial budaya, jika tidak maka pelaksanaan program tidak akan optimal (Harris, 2000). Partisipasi aktif masyarakat juga merupakan penentu

dalam keberhasilan suatu program pemerintah. Pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat merupakan salah satu strategi pengelolaan yang dapat meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam. Komunitas lokal memiliki keterikatan yang kuat dengan daerahnya sehingga pengelolaan yang dilakukan akan diusahakan demi kebaikan daerahnya (Harahab dan Graziano, 2011). Suprayitno (2011) juga menemukan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan masih tergolong rendah dikarenakan rendahnya tingkat keberdayaan dan kurang optimalnya tingkat kemampuan masyarakat sekitar hutan dalam mengelola dan memanfaatkan hasil hutan. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam sebagian kegiatan perencanaan dan pelaksanaan program, serta tidak adanya penyuluhan yang teratur mengakibatkan masyarakat tidak mendapatkan informasi yang cukup, sehingga masyarakat menjadi kurang termotivasi dalam melaksanakan kegiatan program secara keseluruhan. Padahal, menurut Suprayitno (2008) pelibatan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan dalam rangka pelestarian dan pengelolaan hutan merupakan hal mendasar untuk mengembangkan dan membangun kesadaran kritis masyarakat pengelola hutan.

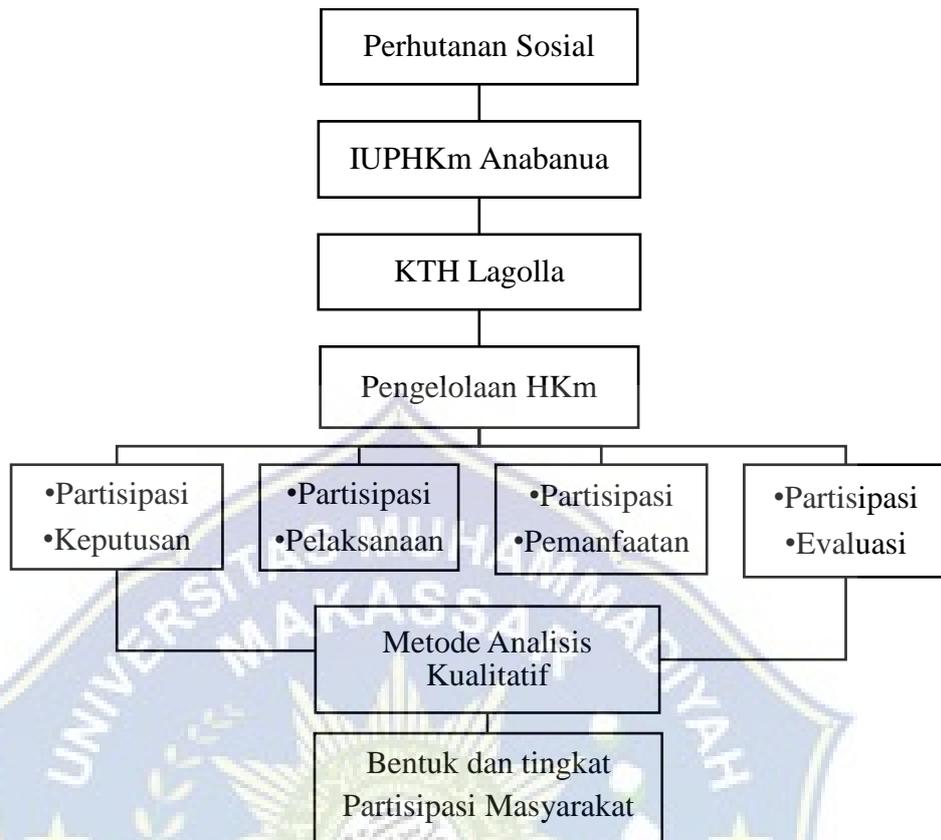
Menurut Astuti dkk., (2011) membedakan 4 (empat) jenis partisipasi, yaitu:

- a. Partisipasi terhadap pengambilan keputusan merupakan keterlibatan dalam mengidentifikasi alternatif dengan masyarakat sehubungan dengan ide atau gagasan yang menjadi kepentingan bersama.

- b. partisipasi terhadap pelaksanaan adalah keberlangsungan dari suatu program yang telah dimulai sebelumnya baik dari segi perencanaan, pelaksanaan ataupun tujuan.
- c. partisipasi terhadap pemanfaatan tidak dapat dipisahkan dengan hasil implementasi yang dicapai baik secara kualitatif maupun kuantitatif hal ini tercermin secara kualitatif dalam produk yang dihasilkan dan secara kuantitatif dalam keberhasilan program.
- d. partisipasi terhadap evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang telah direncanakan sebelumnya dengan tujuan untuk menentukan kinerja program yang telah direncanakan sebelumnya.

2.5 Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian pada kerangka teoritis, melalui penelitian ini akan diungkapkan perhutanan sosial dalam mengembangkan Partisipasi Kelompok Tani Hutan La Golla Dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Desa Anabanua, Kecamatan baru, Kabupaten Barru. untuk lebih jelasnya kerangka pikir penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan mulai Juni sampai Agustus 2023 yang bertempat di Desa Anabanua, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru.

3.2 Objek Penelitian

Adapun objek dalam penelitian ini adalah Kelompok Tani Hutan (KTH) LaGolla yang berada Pada Hutan Kemasyarakatan (HKm) Desa Anabanua, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru.

3.3 Alat dan Bahan

Alat dan Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Alat tulis untuk mencatat setiap informasi responden, Daftar pertanyaan (Kuisisioner) sebagai panduan wawancara terhadap responden, Kamera (foto), untuk dokumentasi.

3.4 Sampel Penelitian

Sasaran dalam penelitian ini adalah anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) LaGolla pada Hutan Kemasyarakatan (HKm). Sedangkan jumlah seluruh anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) LaGolla sebanyak 187 orang dan yang menjadi responden dilakukan dengan teknik *purposive sampling* sebanyak 30 % dari total responden 57 orang yang aktif dan terlibat dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan.

3.5 Pengumpulan Data

3.5.1 Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder

- a. Data primer adalah pendapat dari responden melalui observasi lapangan, wawancara dan kuisisioner dalam bentuk pertanyaan yang diajukan.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai keadaan umum lokasi penelitian dan Informasi penunjang lainnya.

3.5.2 Teknik pengumpulan data

- a. Teknik observasi

Observasi atau pengamatan secara langsung untuk mendapatkan kondisi objek yang akan dikaji dengan melihat secara langsung fenomena yang terjadi.

Selain itu, observasi dilakukan untuk memvalidasi data hasil wawancara dengan situasi di lapangan.

b. Teknik wawancara

Untuk mengumpulkan data dari sejumlah data (variabel) dan informasi lainnya pada suatu kelompok masyarakat dilakukan melalui wawancara langsung dan berpedoman pada pertanyaan yang telah disediakan sebelumnya (Singarimbun, 1995). Data yang dimasukkan dalam panduan wawancara terdiri atas: Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas; nama, umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, pendapatan anggota kelompok yang didapat secara langsung dari kegiatan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm).

3.6 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian dimulai dengan menelaah seluruh data yang diperoleh melalui hasil kuisioner dan wawancara kemudian dideskripsikan dengan cara menggunakan analisis persentase untuk menghitung persentase jawaban yang diberikan responden. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan analisis yang berlainan disesuaikan dengan tujuan penelitian, sebagai berikut ;

1. Bentuk Partisipasi, dijabarkan dengan mengacu pada uraian (Huraerah., 2008) ;

- a). Partisipasi Tenaga merupakan bentuk partisipasi yang diwujudkan melalui beragam aktivitas seperti persiapan dan pembuatan bahan tanaman (Stek), persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan hingga siap panen.
- b). Partisipasi Sosial, merupakan bentuk partisipasi atau keterlibatan seseorang pada sistem kehidupan sosial.

2. Tingkat Partisipasi, dapat diukur dengan menggunakan indikator keterlibatan dalam kegiatan berdasarkan uraian Yadav (1980) dalam (Theresia 2014) dan pemberian skoring menggunakan skala Likert (1-3) ;

a) Partisipasi dalam pembuatan rencana

Artinya masyarakat berperan aktif dalam menyumbangkan pemikirannya baik dalam pengambilan keputusan khususn yadalam musyawarah rencana dan dalam proses perencanaan.

b) Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan

Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan merupakan suatu kontribusi masyarakat terhadap tindakan yang diberikan demi terciptanya kerjasama dan rasa solidaritas. Partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan merupakan bentuk dari kesadaran dan kepedulian masyarakat serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya partisipasi. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dapat diartikan sebagai memberikan sumbangan dalam bentuk tenaga, uang tunai, maupun berbentuk barang.

c) Partisipasi dalam evaluasi dan pemantauan

partisipasi terhadap evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang telah direncanakan sebelumnya dengan tujuan untuk menentukan kinerja program yang telah direncanakan sebelumnya.

d) Partisipasi dalam pengelolaan hasil

partisipasi terhadap pemanfaatan tidak dapat dipisahkan dengan hasil implementasi yang dicapai baik secara kualitatif maupun kuantitatif hal ini

tercermin secara kualitatif dalam produk yang dihasilkan dan secara kuantitatif dalam keberhasilan program.

Untuk mendapatkan tingkat partisipasi, total nilai maksimum 3 dan minimum 1. Selanjutnya nilai setiap responden dijumlahkan dan dibuat pemeringkatan dengan skala penilaian sebagai berikut:

$$\text{Selisih per kategori} = \frac{\text{skor tertinggi} - \text{skor terendah}}{\text{jumlah kategori}}$$

$$\text{Selisih per kategori} = \frac{3-1}{3}$$

$$\text{Selisih per kategori} = 0,67$$

Berdasarkan rumus di atas, dapat dilihat tingkat nilainya masing-masing seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Tingkat Partisipasi Masyarakat

No	Tingkat Partisipasi Masyarakat	
	Tingkat	Kategori
1.	Tinggi	2,36 - 3,00
2.	Sedang	1,68 - 2,35
3.	Rendah	1,00 - 1,67

Sumber

: Hasil

Modifik

asi

Skala

Liker Manolang 2007.

$$\text{Cara Mendapatkan Skor Rata-Rata} = \frac{\text{jumlah total skor}}{\text{jumlah responden}}$$

$$\text{Cara Untuk Mendapatkan Presentase} = \frac{\text{jumlah orang}}{\text{jumlah reponden}} \times 100$$

Cara Mendapatkan Kategori

$$= \frac{\text{jumlah total skor}}{\text{jumlah pertanyaan}}$$

3.7 Variabel Penelitian

Tabel 2. Variabel, Definisi dan Indikator.

No	Variable	Kegiatan	Indikator	Skor
1.	Partisipasi Keputusan	Pertemuan Kelompok	Diukur berdasarkan skor apakah responden ikut berpartisipasi dalam kegiatan rapat dan pertemuan	1.Tinggi 2.Sedang 3.Rendah

No	Variable	Kegiatan	Indikator	Skor
2.	Partisipasi Pelaksanaan	Keterlibatan responden Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan	Diukur berdasarkan skor apakah responden terlibat dalam kegiatan pelaksanaan	1.Tinggi 2.Sedang 3.Rendah
3.	Partisipasi Pemanfaatan	Keterlibatan responden dalam memanfaatkan hasil dari pengelolaan HKm	Diukur berdasarkan skor apakah responden terlibat dalam pemanfaatan hasil dari pengelolaan HKm	1.Tinggi 2.Sedang 3.Rendah
4.	Partisipasi Evaluasi	Keterlibatan responden dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan	Dinilai apakah responden terlibat atau tidak dalam pelaksanaan kegiatan evaluasi.	1.Tinggi 2.Sedang 3.Rendah

Sumber : Modifikasi Huraera 2008 dan Theresia 2014

IV HASIL DAN PEMBAHASAN

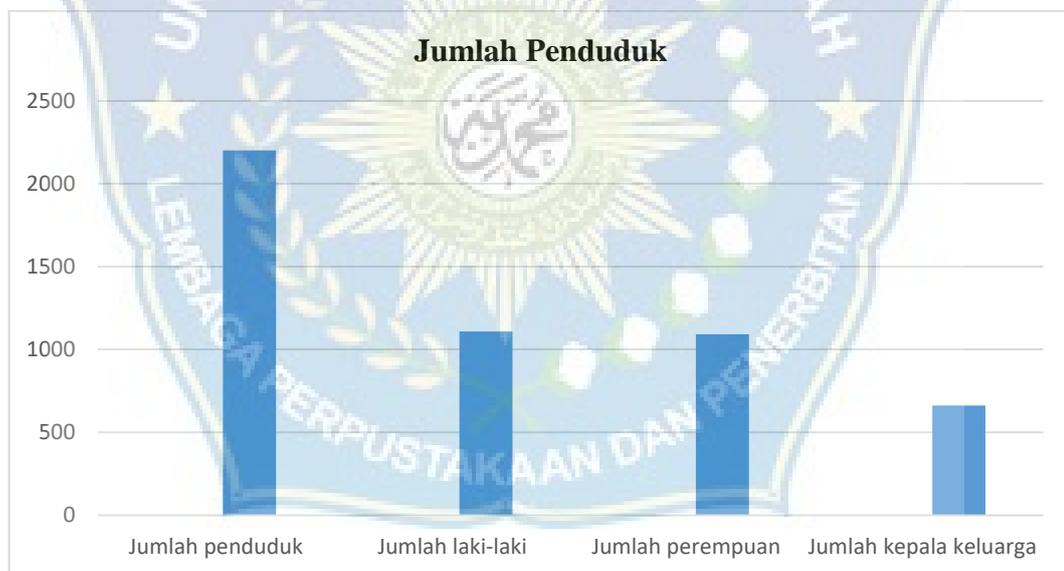
4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Anabanua, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru memiliki luas wilayah 20,00 Ha terletak di kecamatan barru kabupaten barru status Kawasan hutan lindung (HL) dan hutan produksi terbatas (HPT).

a. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk Desa Anabanua, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Jumlah Penduduk

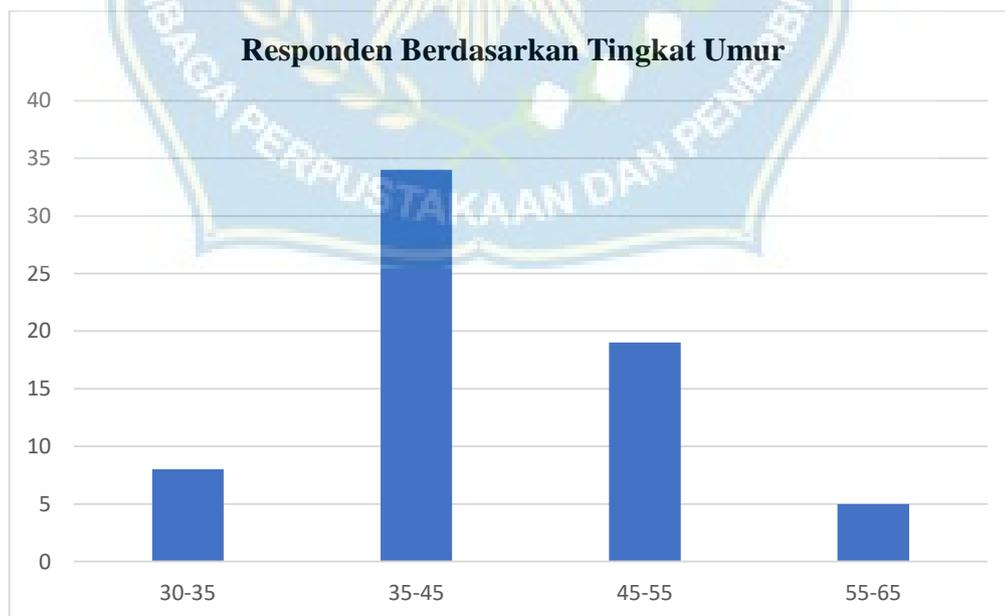
Berdasarkan pada gambar 2 Jumlah penduduk 2,201, Jumlah laki-laki 1,109, Jumlah Perempuan 1,092, Jumlah kepala keluarga 661 di Desa Anabanua, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru.

b. Profil Kelompok

Kelompok Tani Hutan (KTH) LaGolla merupakan salah satu kelompok yang berada di Desa Anabanua Kecamatan Barru Kabupaten Barru, kelompok tani hutan (KTH) LaGolla terbentuk pada tanggal 22 februari 2013 kemudian diberikan Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) dari Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia dengan Nomor :SK.6895/MENLHK-PSKL/PSL.0/12/2017 pada tanggal 22 desember 2017 dengan jumlah anggota 187 orang dengan luas \pm 345 hektar pada Kawasan hutan lindung di Desa Anabanua, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan.

4.1.2 Responden Berdasarkan Tingkat Umur

Responden yang mengelolah Hutan Kemasyarakatan (HKm) LaGolla berdasarkan tingkat umur dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Responden Berdasarkan Tingkat Umur

Berdasarkan pada gambar 3 dapat dilihat klasifikasi tingkat umur responden yang mengelolah Hutan Kemasyarakatan (HKm) LaGolla kisaran 30-35 terdapat 8 Orang, kisaran 35-45 terdapat 34 Orang, kisaran 45-55 terdapat 19 Orang, 55-65 terdapat 5 Orang, pada kelompok pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Anabanua, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru.

4.1.3 Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Responden yang mengelolah Hutan Kemasyarakatan (HKm) LaGolla berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan pada gambar 4 dapat dilihat klasifikasi tingkat Pendidikan responden yang mengelolah Hutan Kemasyarakatan (HKm) laGolla Sd sebanyak 26 orang, Smp sebanyak 9 orang, Sma sebanyak 22 orang, pada kelompok pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Anabanua, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru.

4.2 Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm)

4.2.1 Partisipasi Keputusan

Partisipasi keputusan Kelompok Tani Hutan (KTH) LaGolla berperan aktif dalam menyumbangkan pemikirannya baik dalam pengambilan keputusan khususnya dalam musyawarah rencana, ide atau gagasan seperti dalam pembuatan rencana yang menjadi kepentingan bersama dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Partisipasi keputusan

a. Partisipasi Masyarakat Dalam Mengadakan Pertemuan Atau Rapat Kerja

Partisipasi masyarakat dalam mengadakan pertemuan atau rapat kerja dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Anabanua, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Partisipasi Masyarakat Dalam Mengadakan Pertemuan Atau Rapat Kerja

No	Kriteria Jawaban Responden	Nilai	Frekuensi / Jumlah		Skor
			Orang	Presentase (%)	
1.	Ya / sering	3	55	96,49	165
2.	Kadang/ kadang	2	2	3,51	4
3.	Tidak pernah	1	0	0,00	0
Total			57	100	169
Skor Rata-Rata					2,96
Kategori Tingkat Partisipasi = Tinggi					

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 3 diketahui bahwa sebanyak 55 responden yang aktif dan sering menghadiri pertemuan atau rapat kerja dengan alasan penyusunan program kerja untuk kepentingan bersama. dan sebanyak 2 responden kadang-kadang dengan alasan kegiatan lain. Total skor yang diperoleh adalah 169 dengan skor rata-rata 2,96 masuk pada kategori tinggi.

b. Partisipasi Masyarakat Dalam Memberikan Usulan Pada Saat Rapat

Partisipasi masyarakat dalam mengadakan memberikan usulan pada saat rapat dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Anabanua, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Partisipasi Masyarakat Dalam Memberikan Usulan Pada Saat Rapat

No	Kriteria Jawaban Responden	Nilai	Frekuensi / Jumlah		Skor
			Orang	Presentase (%)	
1.	Ya / sering	3	50	87,72	150
2.	Kadang-kadang	2	6	10,53	12
3.	Tidak pernah	1	1	1,75	1
Total			57	100	163
Skor Rata-Rata					2,86
Kategori Tingkat Partisipasi = Tinggi					

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 4 diketahui bahwa sebanyak 50 responden sering memberikan usulan dengan alasan memberikan usulan dapat melancarkan kegiatan, sebanyak 6 responden kadang-kadang dengan alasan terkadang usulannya sama dengan anggota yang lain. Total skor yang diperoleh adalah 163 dengan skor rata-rata 2,86 masuk pada kategori tinggi.

c. Partisipasi Masyarakat Dalam Menyampaikan Masalah Dalam Kegiatan

Partisipasi masyarakat dalam menyampaikan masalah dalam kegiatan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Anabanua, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Partisipasi Masyarakat Dalam Menyampaikan Masalah Dalam Kegiatan

No	Kriteria Jawaban Responden	Nilai	Frekuensi / Jumlah		Skor
			Orang	Presentase (%)	
1.	Ya / sering	3	51	89,47	153
2.	Kadang-kadang	2	6	10,53	12
3.	Tidak pernah	1	0	0,00	0
Total			57	100	165
Skor Rata-Rata					2,89
Kategori Tingkat Partisipasi = Tinggi					

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 5 diketahui bahwa sebanyak 51 responden sering menyampaikan masalah dalam kegiatan dengan anggota lain agar dapat

menemukan solusi dengan tepat, sebanyak 6 responden kadang-kadang dengan alasan masalah yang dialami anggota yang lain sama dengan anggota yang lain. Total skor yang diperoleh adalah 165 dengan skor rata-rata 2,89 masuk pada kategori Tinggi.

d. Partisipasi Masyarakat Dalam Menyampaikan Solusi Dalam Pertemuan

Partisipasi masyarakat dalam menyampaikan solusi dalam pertemuan dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Anabanua, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Partisipasi Masyarakat Dalam Menyampaikan Masalah Dalam Kegiatan

No	Kriteria Jawaban Responden	Nilai	Frekuensi / Jumlah		Skor
			Orang	Presentase (%)	
1.	Ya / sering	3	49	85,96	147
2.	Kadang-kadang	2	8	14,04	16
3.	Tidak pernah	1	0	0,00	0
Total			57	100	163
Skor Rata-Rata					2,86
Kategori Tingkat Partisipasi = Tinggi					

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 6 diketahui bahwa sebanyak 49 responden sering menyampaikan solusi menyampaikan solusi kepada anggota lain dapat membantu anggota menyelesaikan masalah dengan cepat, dalam pertemuan sebanyak 8 responden kadang-kadang dengan alasan sudah banyak anggota yang memberi solusi, Total skor yang diperoleh adalah 163 dengan skor rata-rata 2,86 masuk pada kategori tinggi.

e. Partisipasi Masyarakat Dalam Menghadiri Pertemuan

Partisipasi masyarakat dalam menghadiri pertemuan dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Anabanua, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Partisipasi Masyarakat Dalam Menghadiri Pertemuan

No	Kriteria Jawaban Responden	Nilai	Frekuensi / Jumlah		Skor
			Orang	Presentase (%)	
1.	Ya / sering	3	55	96,49	165
2.	Kadang-kadang	2	2	3,51	4
3.	Tidak pernah	1	0	0,00	0
Total			57	100	169
Skor Rata-Rata					2,96
Kategori Tingkat Partisipasi = Tinggi					

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 7 diketahui bahwa sebanyak 55 responden sering menghadiri pertemuan dengan alasan kepentingan kemajuan anggota, sebanyak 2 responden kadang-kadang dengan alasan kegiatan lain. Total skor yang diperoleh adalah 169 dengan skor rata-rata 2,96 masuk pada kategori tinggi.

f. Rekapitulasi Partisipasi Keputusan

Tabel 8. Rekapitulasi Partisipasi Keputusan

No	Tingkat Partisipasi Masyarakat	Skor	Kategori
1.	Partisipasi masyarakat dalam mengadakan pertemuan atau rapat kerja	2,96	Tinggi
2.	Partisipasi masyarakat dalam memberikan usulan pada saat rapat	2,86	Tinggi
3.	Partisipasi masyarakat dalam menyampaikan masalah dalam kegiatan	2,89	Tinggi
4.	Partisipasi masyarakat dalam menyampaikan solusi dalam pertemuan	2,86	Tinggi
5.	Partisipasi masyarakat dalam menghadiri pertemuan	2,96	Tinggi
Skor Rata-Rata			2,91
Kategori Tingkat Partisipasi = Tinggi			

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 8 Partisipasi masyarakat dalam dalam mengadakan pertemuan atau rapat kerja dikategorikan Tinggi dengan skor rata-rata 2,96 dengan alasan penyusunan program kerja untuk kepentingan bersama, Partisipasi masyarakat dalam memberikan usulan pada saat rapat dikategorikan Tinggi dengan skor rata-rata 2,86 dengan alasan menyampaikan usulan kepada anggota lain agar kegiatan berjalan dengan lancar, Partisipasi masyarakat dalam dalam menyampaikan masalah dalam kegiatan dikategorikan Tinggi dengan skor rata-rata 2,89 dengan alasan agar dapat menyelesaikan masalah dengan cara mencari solusi bersama, Partisipasi masyarakat dalam menyampaikan solusi dalam pertemuan dikategorikan Tinggi dengan skor rata-rata 2,86, dengan alasan menyampaikan solusi dengan anggota dapat membantu menyelesaikan masalah dengan tepat, Partisipasi masyarakat dalam menghadiri pertemuan dikategorikan Tinggi dengan skor rata-rata 2,96 dengan alasan pertemuan penting untuk

kemajuan kelompok, Partisipasi Kelompok Tani Hutan (KTH) LaGolla dalam memberikan keputusan di pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Anabanua, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. Dengan rata-rata skor 2,91 masuk pada kategori tinggi.

4.2.2 Partisipasi Pelaksanaan

Partisipasi pelaksana Kelompok Tani Hutan (KTH) LaGolla terhadap keberlangsungan dari suatu program yang telah dimulai sebelumnya baik dari segi perencanaan, pelaksanaan seperti penanaman dan pemeliharaan dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6. Partisipasi pelaksanaan

a. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Kegiatan

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Anabanua, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Kegiatan

No	Kriteria Jawaban Responden	Nilai	Frekuensi / Jumlah		Skor
			Orang	Presentase (%)	
1.	Ya / sering	3	55	96,49	165
2.	Kadang-kadang	2	2	3,51	4
3.	Tidak pernah	1	0	0	0
Total			57	100	169
Skor Rata-Rata					2,96
Kategori Tingkat Partisipasi = Tinggi					

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 9 diketahui bahwa sebanyak 55 responden sering dalam pelaksanaan kegiatan untuk kepentingan kemajuan anggota dengan alasan menyukseskan suatu kegiatan,, sebanyak 2 responden kadang-kadang dengan alasan banyak kegiatan lain. Total skor yang diperoleh adalah 169 dengan skor rata-rata 2,96 masuk pada kategori tinggi.

b. Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Yang Dirapatkan

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang dirapatkan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (Hkm) di Desa Anabanua, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Yang Dirapatkan

No	Kriteria Jawaban Responden	Nilai	Frekuensi / Jumlah		Skor
			Orang	Presentase (%)	
1.	Ya / sering	3	51	89,47	153
2.	Kadang-kadang	2	6	10,53	12
3.	Tidak pernah	1	0	0	0
Total			57	100	165
Skor Rata-Rata					2,89
Kategori Tingkat Partisipasi = Tinggi					

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 10 diketahui bahwa sebanyak 51 responden sering dalam kegiatan yang dirapatkan dengan alasan membahas kegiatan atau masalah dilapangan, sebanyak 6 responden kadang-kadang dengan alasan kegiatan lain. Total skor yang diperoleh adalah 165 dengan skor rata-rata 2,89 masuk pada kategori tinggi.

c. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengadaan Bibit

Partisipasi masyarakat dalam pengadaan bibit pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Anabanua, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dan jenis bibit yang didapatkan seperti Aren, Kopi, Rambutan, dan Durian dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengadaan Bibit

No	Kriteria Jawaban Responden	Nilai	Frekuensi / Jumlah		Skor
			Orang	Presentase (%)	
1.	Ya / sering	3	50	87,72	150
2.	Kadang-kadang	2	7	12,28	14
3.	Tidak pernah	1	0	0,00	0
Total			57	100	164
Skor Rata-Rata					2,88
Kategori Tingkat Partisipasi = Tinggi					

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, (2023)

Berdasarkan Tabel 11 diketahui bahwa sebanyak 50 responden dalam pengadaan bibit dengan alasan bibit dapat dibagikan dengan cepat dimasyarakat, sebanyak 7 responden kadang-kadang dengan alasan kegiatan lain. Total skor yang diperoleh adalah 164 dengan skor rata-rata 2,88 masuk pada kategori tinggi.

d. Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Penanaman Bibit

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan penanaman bibit pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Anabanua, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Penanaman Bibit

No	Kriteria Jawaban Responden	Nilai	Frekuensi / Jumlah		Skor
			Orang	Presentase (%)	
1.	Ya / sering	3	54	94,74	162
2.	Kadang-kadang	2	3	5,26	6
3.	Tidak pernah	1	0	0,00	0
Total			57	100	168
Skor Rata-Rata					2,95
Kategori Tingkat Partisipasi = Tinggi					

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 12 diketahui bahwa sebanyak 54 dalam kegiatan penanaman bibit dengan alasan untuk mencapai tujuan bersama, sebanyak 3 responden kadang-kadang dengan alasan banyak kegiatan lain. Total skor yang diperoleh adalah 168 dengan skor rata-rata 2,95 masuk pada kategori tinggi.

e. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengamanan Areal Hutan

Partisipasi masyarakat yang sering sering ikut dalam pengamanan areal hutan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Anabanua, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengamanan Areal Hutan

No	Kriteria Jawaban Responden	Nilai	Frekuensi / Jumlah		Skor
			Orang	Presentase (%)	
1.	Ya / sering	3	47	82,46	141
2.	Kadang-kadang	2	10	17,54	20
3.	Tidak pernah	1	0	0,00	0
Total			57	100	161
Skor Rata-Rata					2,82
Kategori Tingkat Partisipasi = Tinggi					

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 13 diketahui bahwa sebanyak 47 dalam pengamanan areal hutan dengan alasan agar tidak terjadi penebangan liar disekitar Kawasan dan kebakaran,, sebanyak 10 responden kadang-kadang dengan alasan kegiatan lain. Total skor yang diperoleh adalah 161 dengan skor rata-rata 2,82 masuk pada kategori tinggi.

f. Rekapitulasi Partisipasi Pelaksanaan

Tabel 14. Rekapitulasi Partisipasi Pelaksanaan

No	Tingkat Partisipasi Masyarakat	Skor	Kategori
1.	Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan	2,96	Tinggi
2.	Partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang dirapatkan	2,89	Tinggi
3.	Partisipasi masyarakat dalam pengadaan bibit	2,88	Tinggi
4.	Partisipasi masyarakat dalam kegiatan penanaman bibit	2,95	Tinggi
5.	Partisipasi masyarakat dalam pengamanan areal hutan	2,82	Tinggi
Skor Rata-Rata			2,90
Kategori Tingkat Partisipasi = Tinggi			

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2023

Tabel 14 menunjukkan Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan dikategorikan tinggi dengan skor rata-rata 2,96 dengan alasan menyukseskan suatu kegiatan, Partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang dirapatkan dikategorikan tinggi dengan skor rata-rata 2,89 dengan alasan membahas kegiatan atau masalah dilapangan, Partisipasi masyarakat dalam pengadaan bibit dikategorikan tinggi dengan skor rata-rata 2,88 dengan alasan bibit dapat dibagikan dengan cepat dimasyarakat, Partisipasi masyarakat yang sering ikut serta dalam kegiatan penanaman bibit dikategorikan tinggi dengan skor rata-rata

2,95 dengan alasan untuk mencapai tujuan bersama , Partisipasi masyarakat yang sering sering ikut serta dalam kegiatan pengamanan areal hutan dikategorikan tinggi dengan skor rata-rata skor 2,82 dengan alasan agar tidak terjadi penebangan liar dan kebakaran disekitar kawasan, Partisipasi Pelaksanaan kegiatan di pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Desa Anabanua, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. Dengan skor rata-rata 2,90 masuk pada kategori tinggi.

4.2.3 Partisipasi Pemanfaatan

Partisipasi pemanfaatan Kelompok Tani Hutan (KTH) LaGolla tidak dapat dipisahkan dengan hasil penerapan dan pelaksanaan yang dicapai baik dalam produk yang dihasilkan salah satu produk yang dihasilkan adalah madu alam dapat dilihat pada Gambar 7.



Gambar 7. Pemanfaatan Madu Alam

a. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembukaan Wilayah Hutan

Partisipasi masyarakat dalam pembukaan wilayah hutan kelompok pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di di Desa Anabanua, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembukaan Wilayah Hutan

No	Kriteria Jawaban Responden	Nilai	Frekuensi / Jumlah		Skor
			Orang	Presentase (%)	
1.	Ya / sering	3	39	68,42	117
2.	Kadang/-kadang	2	18	31,58	36
3.	Tidak pernah	1	0	0,00	0
Total			57	100	153
Skor Rata-Rata					2,68
Kategori Tingkat Partisipasi = Tinggi					

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 15 diketahui bahwa sebanyak 39 responden yang dalam pembukaan wilayah hutan total skor yang diperoleh adalah 153 dengan skor rata-rata 2,68 masuk pada kategori tinggi.

b. Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Penetapan Petak Kerja

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan penetapan petak kerja di kelompok pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Anabanua, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dapat dilihat pada Tabel 16.

Tabel 16. Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Penetapan Petak Kerja

No	Kriteria Jawaban Responden	Nilai	Frekuensi / Jumlah		Skor
			Orang	Presentase (%)	
1.	Ya / sering	3	51	89,47	153
2.	Kadang-kadang	2	6	10,53	12
3.	Tidak pernah	1	0	0,00	0
total			57	100	165
Skor Rata-Rata					2,89
Kategori Tingkat Partisipasi = Tinggi					

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 16 diketahui bahwa sebanyak 51 responden yang dalam kegiatan penetapan petak kerja , total skor yang diperoleh adalah 165 dengan skor rata-rata 2,89 masuk pada kategori tinggi.

c. Partisipasi Masyarakat Dalam Mengambil Tumbuhan Obat

Partisipasi masyarakat dalam mengambil jenis tumbuhan obat seperti Jahe, Lengkuas, Kunyit dan daun Kemangi di Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Anabanua, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dapat dilihat pada Tabel 17.

Tabel 17. Partisipasi Masyarakat Dalam Mengambil Tumbuhan Obat

No	Kriteria Jawaban Responden	Nilai	Frekuensi / Jumlah		Skor
			Orang	Presentase (%)	
1.	Ya / sering	3	29	50,88	87
2.	Kadang-kadang	2	19	33,33	38
3.	Tidak pernah	1	9	15,79	9
Total			57	100	134
Skor Rata-Rata					2,35
Kategori Tingkat Partisipasi = Tinggi					

Sumber: *Data Primer Setelah Diolah, (2023)*

Berdasarkan Tabel 17 diketahui bahwa sebanyak 29 responden yang dalam dalam mengambil tumbuhan obat, total skor yang diperoleh adalah 134 dengan skor rata-rata 2,35 masuk pada kategori tinggi.

d. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Rencana Kerja

Partisipasi masyarakat dalam pembuatan rencana kerja seperti perlindungan dan pengamanan hutan dan pemanfaatan hasil hutan di kelompok pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Anabanua, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dapat dilihat pada Tabel 18.

Tabel 18. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Rencana Kerja

No	Kriteria Jawaban Responden	Nilai	Frekuensi / Jumlah		Skor
			Orang	Presentase (%)	
1.	Ya / sering	3	54	94,74	162
2.	Kadang- kadang	2	3	5,26	6
3.	Tidak pernah	1	0	0,00	0
Total			57	100	168
Skor Rata-Rata					2,95
Kategori Tingkat Partisipasi = Tinggi					

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 18 diketahui bahwa sebanyak 54 responden yang dalam pembuatan rencana kerja, total skor yang diperoleh adalah 168 dengan skor rata-rata 2,95 masuk pada kategori tinggi.

e. Partisipasi Masyarakat Dalam Menjalankan Program Kerja

Partisipasi masyarakat dalam menjalankan program kerja di kelompok pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Anabanua, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dapat dilihat pada Tabel 19.

Tabel 19. Partisipasi Masyarakat Dalam Menjalankan Program Kerja

No	Kriteria Jawaban Responden	Nilai	Frekuensi / Jumlah		Skor
			Orang	Presentase (%)	
1.	Ya / sering	3	56	98,25	168
2.	Kadang-kadang	2	1	1,75	2
3.	Tidak pernah	1	0	0,00	0
Total			57	100	170
Skor Rata-Rata					2,98
Kategori Tingkat Partisipasi = Tinggi					

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 19 diketahui bahwa sebanyak 56 responden yang dalam menjalankan program kerja, total skor yang diperoleh adalah 170 dengan skor rata-rata 2,98 masuk pada kategori tinggi.

f.Rekapitulasi Partisipasi Pemanfaatan

Tabel 20. Rekapitulasi Partisipasi Pemanfaatan

No	Tingkat Partisipasi Masyarakat	Skor	Kategori
1.	Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembukaan wilayah hutan	2,68	Tinggi
2.	Partisipasi masyarakat dalam kegiatan penetapan petak kerja	2,89	Tinggi
3.	Partisipasi masyarakat dalam mengambil tumbuhan obat	2,35	Tinggi
4.	Partisipasi masyarakat dalam pembuatan rencana kerja	2,95	Tinggi
5.	Partisipasi masyarakat dalam menjalankan program kerja	2,98	Tinggi
Skor Rata-Rata			2,77
Kategori Tingkat Partisipasi = Tinggi			

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2023

Tabel 20 menunjukkan Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembukaan wilayah hutan dikategorikan tinggi dengan skor rata-rata 2,68, Partisipasi masyarakat dalam kegiatan penetapan petak kerja dikategorikan tinggi skor rata-rata 2,89 dengan, Partisipasi masyarakat dalam mengambil tumbuhan obat dikategorikan tinggi skor rata-rata 2,35 dengan dengan alasan terbiasa menggunakan obat herbal dari dulu, Partisipasi masyarakat dalam pembuatan rencana kerja dikategorikan tinggi skor rata-rata 2,95, Partisipasi masyarakat dalam menjalankan program kerja dikategorikan tinggi skor rata-rata 2,98 dengan alasan agar masyarakat lebih maju, tingkat partisipasi masyarakat dalam

Pemanfaatan di pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Anabanua, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. dengan skor rata – rata 2,77 masuk pada kategori tinggi.

4.2.4 Partisipasi Evaluasi

Partisipasi Evaluasi Kelompok Tani Hutan (KTH) LaGolla berkaitan dengan pelaksanaan program yang telah direncanakan sebelumnya seperti pembibitan, penanaman, pemanenan dapat dilihat pada Gambar 8.





Gambar 8. Partisipasi Evaluasi

a. Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Yang Telah Direncanakan

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang telah direncanakan di kelompok pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Anabanua, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dapat dilihat pada Tabel 21.

Tabel 21. Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Yang Telah Direncanakan

No	Kriteria Jawaban Responden	Nilai	Frekuensi / Jumlah		Skor
			Orang	Presentase (%)	
1.	Ya / sering	3	53	92,98	159
2.	Kadang-kadang	2	4	7,02	8
3.	Tidak pernah	1	0	0,00	0
Total			57	100	167

Skor Rata-Rata	2,93
Kategori Tingkat Partisipasi = Tinggi	

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 21 diketahui bahwa sebanyak 53 responden dalam kegiatan yang telah direncanakan dengan alasan untuk membuat perencanaan dalam pelaksanaan kegiatan, total skor yang diperoleh adalah 167 dengan skor rata-rata 2,93 masuk pada kategori tinggi.

b. Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Persiapan Lahan Pemanenan

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan persiapan lahan pemanenan di kelompok pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Anabanua, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dapat dilihat pada Tabel 22.

Tabel 22. Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Persiapan Lahan Pemanenan

No	Kriteria Jawaban Responden	Nilai	Frekuensi / Jumlah		Skor
			Orang	Presentase (%)	
1.	Ya / sering	3	38	66,67	114
2.	Kadang-kadang	2	19	33,33	38
3.	Tidak pernah	1	0	0,00	0
Total			57	100	152
Skor Rata-Rata					2,67
Kategori Tingkat Partisipasi = Tinggi					

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 22 diketahui bahwa sebanyak 38 responden dalam kegiatan persiapan lahan pemanenan dengan alasan agar mendapatkan hasil yang diinginkan, total skor yang diperoleh adalah 152 dengan skor rata-rata 2,67 masuk pada kategori tinggi.

c. Partisipasi Masyarakat Dalam Melakukan Pemeliharaan Penanaman

Partisipasi masyarakat dalam melakukan pemeliharaan penanaman di kelompok pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Anabanua, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dapat dilihat pada Tabel 23.

Tabel 23. Partisipasi Masyarakat Dalam Melakukan Pemeliharaan Penanaman

No	Kriteria Jawaban Responden	Nilai	Frekuensi / Jumlah		Skor
			Orang	Presentase (%)	
1.	Ya / sering	3	48	84,21	144
2.	Kadang-kadang	2	9	15,79	18
3.	Tidak pernah	1	0	0,00	0
Total			57	100	162
Skor Rata-Rata					2,84
Kategori Tingkat Partisipasi = Tinggi					

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 23 diketahui bahwa sebanyak 48 responden dalam melakukan pemeliharaan penanaman dengan alasan merawat tanaman agar tumbuh subur demi mendapatkan hasil yang maksimal, total skor yang diperoleh adalah 162 dengan skor rata-rata 2,84 masuk pada kategori tinggi.

d. Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pemanenan

Partisipasi masyarakat dalam proses pemanenan seperti kopi, marica dan rambutan di kelompok pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Anabanua, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dapat dilihat pada Tabel 24.

Tabel 24. Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pemanenan

No	Kriteria Jawaban Responden	Nilai	Frekuensi / Jumlah		Skor
			Orang	Presentase (%)	
1.	Ya / sering	3	50	87,72	150
2.	Kadang-kadang	2	7	12,28	14
3.	Tidak pernah	1	0	0,00	0

Total	57	100	164
Skor Rata-Rata			2,88
Kategori Tingkat Partisipasi = Tinggi			

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 24 diketahui bahwa sebanyak 50 responden dalam proses pemanenan dengan alasan hasil dari pemanenan dapat dipasarkan , total skor yang diperoleh adalah 164 dengan skor rata-rata 2,88 masuk pada kategori tinggi.

e. Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pasca Panen

Partisipasi masyarakat dalam proses pasca panen di kelompok pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Anabanua, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dapat dilihat pada Tabel 25.

Tabel 25. Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pasca Panen

No	Kriteria Jawaban Responden	Nilai	Frekuensi / Jumlah		Skor
			Orang	Presentase (%)	
1.	Ya / sering	3	51	89,47	153
2.	Kadang-kadang	2	6	10,53	12
3.	Tidak pernah	1	0	0,00	0
Total			57	100	165
Skor Rata-Rata					2,89
Kategori Tingkat Partisipasi = Tinggi					

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 25 diketahui bahwa sebanyak 51 responden dalam proses pasca panen , total skor yang diperoleh adalah 165 dengan skor rata-rata 2,89 masuk pada kategori tinggi.

f.Rekapitulasi Partisipasi Evaluasi

Tabel 26. Rekapitulasi Partisipasi Evaluasi

No	Tingkat Partisipasi Masyarakat	Skor	Kategori
1.	Partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang	2,93	Tinggi

No	Tingkat Partisipasi Masyarakat	Skor	Kategori
	telah direncanakan		
2.	Partisipasi masyarakat dalam kegiatan persiapan lahan dan pemanenan	2,67	Tinggi
3.	Partisipasi masyarakat dalam melakukan pemeliharaan penanaman	2,84	Tinggi
4.	Partisipasi masyarakat dalam proses pemanenan	2,88	Tinggi
5.	Partisipasi masyarakat dalam proses pasca panen	2,89	Tinggi
Skor Rata-Rata			2,84
Kategori Tingkat Partisipasi = Tinggi			

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2023

Tabel 26 menunjukkan Partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang telah direncanakan dikategorikan tinggi dengan skor rata-rata 2,93 dengan alasan untuk membuat perencanaan dalam pelaksanaan kegiatan, Partisipasi masyarakat dalam kegiatan persiapan lahan pemanenan dikategorikan tinggi dengan skor rata-rata 2,67 dengan alasan agar mendapatkan hasil yang diinginkan, Partisipasi masyarakat dalam melakukan pemeliharaan penanaman dikategorikan tinggi dengan skor rata-rata 2,84 dengan alasan merawat tanaman agar tumbuh subur demi mendapatkan hasil yang maksimal, Partisipasi masyarakat dalam proses pemanenan dikategorikan tinggi dengan skor rata-rata 2,88, Partisipasi masyarakat dalam proses pasca panen dikategorikan tinggi dengan skor rata-rata 2,89 dengan alasan hasil dari pemanenan dapat dipasarkan, Partisipasi masyarakat dalam melakukan evaluasi di pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Anabanua, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dengan skor rata-rata 2,84 masuk pada kategori tinggi.

4.3 Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm)

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) diukur menggunakan Skala Likert, untuk selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 27.

Tabel 27. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm)

No	Jenis Partisipasi	Rata-Rata Skor
1.	Partisipasi masyarakat dalam mengadakan pertemuan atau rapat kerja	2,96
2.	Partisipasi masyarakat dalam memberikan usulan pada saat rapat	2,86
3.	Partisipasi masyarakat dalam menyampaikan masalah dalam kegiatan	2,89
4.	Partisipasi masyarakat dalam menyampaikan solusi dalam pertemuan	2,86
5.	Partisipasi masyarakat dalam menghadiri pertemuan	2,96
6.	Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan	2,96
7.	Partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang dirapatkan	2,89
8.	Partisipasi masyarakat dalam pengadaan bibit	2,88
9.	Partisipasi masyarakat dalam kegiatan penanaman bibit	2,95
10.	Partisipasi masyarakat dalam pengamanan areal hutan	2,82
11.	Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembukaan wilayah hutan	2,68
12.	Partisipasi masyarakat dalam kegiatan penetapan petak kerja	2,89
13.	Partisipasi masyarakat dalam mengambil tumbuhan obat	2,35
14.	Partisipasi masyarakat dalam pembuatan rencana kerja	2,95
15.	Partisipasi masyarakat dalam menjalankan program kerja	2,98
16.	Partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang telah direncanakan	2,93
17.	Partisipasi masyarakat dalam proses pemanenan	2,67
18.	Partisipasi masyarakat dalam melakukan pemeliharaan penanaman	2,84
19.	Partisipasi masyarakat dalam proses pemanenan	2,88
20.	Partisipasi masyarakat dalam proses pasca panen	2,89
Jumlah		57,09
Kategori		2,85

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2023

Berdasarkan partisipasi masyarakat dari partisipasi keputusan, partisipasi pemanfaatan, partisipasi evaluasi, partisipasi pelaksana bahwa tingkat partisipasi

kelompok tani Hutan (KTH) dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Anabanua, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dengan rata-rata skor 2,85 masuk kategori tinggi dengan alasan sumber mata pencarian Masyarakat ada di Hutan Kemasyarakatan (HKm). Hal ini didukung dan sejalan dengan penelitian Aditya 2022.

Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya, ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat (meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil. Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan dimaksudkan untuk pengembangan kapasitas dan pemberian akses terhadap masyarakat setempat dalam mengelola hutan secara lestari serta memecahkan persoalan ekonomi dan sosial yang terjadi di masyarakat (Anonim, 2007). Partisipasi petani dalam mengelola hutan kemasyarakatan merupakan faktor yang mendukung keberhasilan pengelolaan hutan rakyat sehingga pengelolaan hutan dapat berkembang secara lestari dan berkelanjutan (Waskito, 2010).

Partisipasi anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) LaGolla di Hutan Kemasyarakatan (Hkm) di Desa Anabanua, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. dapat terlihat juga pada keikutsertaan saat berlangsungnya diskusi. Anggota kelompok secara aktif ikut serta menyampaikan aspirasi. Pada pertemuan anggota kelompok berdiskusi untuk membahas pelaksanaan pengelolaan hutan. Kegiatan tersebut berbentuk diskusi serta berbagi pandangan dengan semua orang yang terlibat, termasuk anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) LaGolla, pengurus dinas

kehutanan. Menurut Gunawam (2013), kegiatan musyawarah ini efektif dalam mendorong keikutsertaan masyarakat dalam menyukseskan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan, termasuk pengelolaan hutan di Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Anabanua, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. Pelaksanaan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang di koordinasikan oleh anggota pelaksana terkait sumber daya dan tugas guna mencapai tujuan bersama secara efisien dan efektif (Sari & Rifai, 2020). Hal ini menandakan bahwa anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) LaGolla berpartisipasi aktif pada pelaksanaan kegiatan yang dilakukan. Kegiatan ini antara lain kegiatan pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran. Tahap pemanfaatan diukur berdasarkan besar hasil pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Serta pada tahapan pemeliharaan dan evaluasi yang diukur masyarakat dalam melakukan pemantauan kawasan hutan pasca kegiatan yang telah dilakukan.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan Hasil penelitian yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa bentuk dan tingkat partisipasi keputusan, partisipasi pelaksanaan, partisipasi pemanfaatan, dan partisipasi evaluasi di Desa Anabanua, Kecamatan barru, Kabupaten Barru memiliki nilai skor berkisar 2,77- 2,91 , sehingga masuk pada kategori tingkat Partisipasi tinggi. Pada tingkat Partisipasi Keputusan memperoleh nilai sebesar 2,91 (tinggi), Partisipasi Pelaksanaan dengan nilai 2,90 (tinggi), Partisipasi Pemanfaatan dengan nilai 2,77 (tinggi), Partisipasi Evaluasi dengan nilai 2,84 (tinggi).

Bentuk partisipasi dalam kegiatan partisipasi keputusan pada Kelompok Tani Hutan (KTH) LaGolla dapat dilihat pada kegiatan dalam musyawarah atau dalam pembuatan program kerja yang menjadi kepentingan bersama, Partisipasi pelaksanaan dapat dilihat pada kegiatan suatu program yang telah dimulai sebelumnya baik dari segi perencanaan, pelaksanaan seperti penanaman dan pemeliharaan. Partisipasi pemanfaatan dapat dilihat pada produk yang dihasilkan salah satu produk yang dihasilkan seperti madu alam. Partisipasi evaluasi dengan pelaksanaan program yang telah direncanakan sebelumnya seperti pembibitan, penanaman, pemanenan, dan pemanfaatan.

5.2 Saran

Diharapkan agar Kelompok Tani Hutan (KTH) Hutan Kemasyarakatan (HKm), agar sering memberikan saran atau masukan dan membahas bagai mana

cara memasarkan produk yang baik dari sebelumnya agar dapat memberi nilai lebih di dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (Hkm) di Desa Anabanua Kecamatan Barru Kabupaten Barru.



DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2007. *Analisis Sosial Ekonomi Community Based Forest Management Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung*. Dinas Kehutanan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Kabupaten Lampung Barat, Undip, Wwf, Icraft, Dan Watala, Liwa.
- Arifin, B., 2006. *Transaction Cost Analysis of Upstream-Downstream Relations in Watershed Services: Lessons From Community-Based Forestry Management in Sumatra, Indonesia*. Quarterly Journal of International Agriculture. 45:361-376.
- Arifin, B., Swallow, B.M., Suyanto, S., dan Coe, R., 2009. *Analysis A Conjoint Analysis of Farmer Preferences for Community Forestry Contracts in The Sumber Jaya Watershed, Indonesia*. Ecological Economics. 68:2040-2050.
- Astuti, S. 2020. *Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi petani program PUPM di Ponorogo*. Manajemen Agribisnis: Jurnal Agribisnis. 20(2): 52-64.
- Astuti, Dwiningrum, Siti, Irene, 2011, *Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pendidikan, Perpustakaan Pelajaran*, Yogyakarta
- Dwiprabowo, H., Mulyaningrum, dan Suwarno, E., 2013. *Organisasi Belajar dan Implementasi Kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKm)*. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan, 10(2):85-98.
- Ekawati,. 2020. *Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan: Untuk Memastikan Tercapainya Tujuan Perhutanan Sosial*. Yogyakarta: Kanisius,
- Gunawan, K.S. 2013. *Implementasi Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat dalam Perspektif Pemberdayaan Desa Hutan di Kabupaten Blora*. Tesis. Universitas Hasanuddin. Makassar. 57 hlm
- Harahab, N & G. Raymond. 2011. *Analisis Indikator Utama Pengelolaan Hutan Mangrove Berbasis Masyarakat di Desa Curahsawo Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo*. Jurnal Sosek KP. Vol. 6(1).
- Huraerah, A. 2008. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Bandung: Humaniora.
- Harris, JM. 2000. *Basic principle of sustainable development. Global development and environment working paper*. 00-04:1- 24. Medford (US): Tufts University.

- Huraerah 2008, Yadav 1980, Theresia 2014 “ *Bentuk Partisipasi dan tingkat partisipasi Masyarakat dalam pemberian Scoring*”
- Hakim, I. 2010. *Orientasi Makro Kebijakan Social Forestry Di Indonesia*. Di dalam: Hakim, I., Irawanti, A., Murniati, Sumarhani, Widiarti, A., Effendi R., Muslich, M., dan Rulliaty S., editor. Jakarta: Penerbit Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan. Jakarta. hlm. 1-29
- Khaeruddin. 2018. *Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar
- Larasati, A.P., Wulandari, C., Febryano, I.G. dan Kaskoyo, H. 2021. *Peran kelembagaan gabungan kelompok tani dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan*. Jurnal Belantara. 4(1): 39-47.
- Manolang. 2007. *Mengukur Tingkat Partisipasi Masyarakat*. Jakarta: Rineka Cipta
- Mitchell B., Setiawan, B., & Rahmi, D.H. 2003. *Pengelolaan sumber daya dan lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Malvry I, L., Hengki D, W., & Maria Y.M.A, S. 2021. *Partisipasi Petani Dalam Pemanfaatan Getah Pinus di Hutan Lindung Soputan Melalui Program Hutan Kemasyarakatan (Studi Kasus Pada Kelompok Tani Rin Pamudi Desa Tombasian Atas Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa)*. Jurnal COCOS, 4(4), 1–11.
- Nugraha, Agung dan Murtijo. 2005. *Antropologi Kehutanan*. Banten: Wana Aksara
- Nur, L., Ajjah, Safe’I, R., Pertanian, F., Lampung U., 2022. *Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Di Hkm Harapan Sentosa Kphl Batuteji*. Ulin - J Hut Trop Vol 6 (2): 114-120
- Pesisir, R., & Meranti, K. K. 2022. *Banau. Pengelolaan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan(IUPHKM) Koperasi Banau Bisa Maju Desa Beting Kecamatan Rangsang Pesisir, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau 2(2), 43–55.*
- Puspasari, E., Wulandari, C., Darmawan, A., & Banuwa, I. S. 2017. *Aspek Sosial Ekonomi Pada Sistem Agroforestri di Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan (HKm) Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung*. Jurnal Sylva Lestari. 5(3): 95-103
- Rosada, I., Boceng, A., & Azis, E. 2020. *Partisipasi Masyarakat Di Sekitar Hutan Dalam Program Perhutanan Sosial*. Jurnal Agrotek, 5(2), 30–36.
- Sari, S.P.W., Rifai, A. 2020. *Pengelolaan desa wisata hutan mangrove Desa*

Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal. 6(2): 121-138

Suharjito, Didik. Dudung Darusman. 1998. *Kehutanan Masyarakat (Beragam Pola Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan)*. Bogor. Program Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Masyarakat. 1 – 162 hal.

Suradireja D.Y, Andi Pramaria, Markum, Wiji Johar Santoso, M. R. H. (2018). *Menoleh jalan panjang hutan kemasyarakatan. Catatan perjalanan tiga dasawarsa program Hutan Kemasyarakatan di Pulau Lombok*.

Supriyanto, H., Roni, J. dan Bayu S. 2017, *Hutan Kemasyarakatan Hidup Matinya Petani Miskin*. Bogor:

Suprayitno AR. 2008. *Pelibatan Masyarakat Lokal: Upaya Memberdayakan Masyarakat Menuju Hutan Lestari*. *Jurnal Penyuluhan* 4 (2) : 135 – 138.

Suprayitno AR,. 2011. *Model Peningkatan Partisipasi Petani Sekitar Hutan dalam Mengelola Hutan Kemiri Rakyat (Kasus Pengelolaan Hutan Kemiri Kawasan Pegunungan Bulusarung Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan)*. Bogor (ID): IPB.

Sagita, M. N., Akhbar, A., & Muis, H. 2019. *Partisipasi Petani Dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Di Desa LabuanToposo Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala*. *Jurnal Warta Rimba*, 7(2)

Safe'i, R., Febryano, I. G., & Nur, L. A. 2018. *Pengaruh Keberadaan Gapoktan Terhadap Pendapatan Petani dan Perubahan Tutupan Lahan di Hutan Kemasyarakatan*. *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora*. 20(2): 109-114

Singarimbun, M. (1995). *Metode Penelitian Survey*. Lembaga Penelitian Pendidikan dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial. Penerbit. Pustaka LP3ES Indonesia. Jakarta. 218 hal Tujuan Perhutanan Sosial. Yogyakarta: Kanisius, 2020.

Suratiyaningrum. 2013. *Evaluasi Program Pengelolaan Hutan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) LMDH Wana Bumi Tirta IPD*.

Sumanto, S. E. 2009. *Kebijakan pengembangan perhutanan sosial dalam perspektif resolusi konflik*. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 6(1), 13–25.

Tanjung, N. S., Sadono, D., & Wibowo, C. T. 2017. *Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Nagari di Sumatera Barat*. *Jurnal Penyuluhan*, 13(1), 14. <https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v13i1.12990>

Winarni, S., Yuwono, S. B. & Herwanti, S. 2016. *Struktur pendapatan, tingkat kesejahteraan dan faktor produksi agroforestri kopi pada kesatuan*

pengelolaan hutan lindung batutege (studi di Gabungan Kelompok Tani Karya Tani Mandiri). Jurnal Sylva Lestari. 4(1) : 1-10.

Wulandari, C. 2015. *Studi persepsi masyarakat tentang pengelolaan landscape agroforestri di sekitar sub das way besai provinsi lampung. Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia. 15(3):137-148.*

Witno, Maria, & Supandi, D. 2020. *Community Participation in the Existence of Community Forest (Hkm) Tandung Billa in Battang and Battang Barat Sub-District, Palopo City. Jurnal Penelitian Kehutanan Bonita, 2(2), 35–42.*

Waznah. 2006. *Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan. Jurnal Lingkungan Hidup. 6 (1) : 1— 6.*

Waskito. 2010. "*Partisipasi Pendidikan Masyarakat Pedesaan dan Tradisi Pernikahan Usia Dini di Indonesia.*" *Sejarah dan Budaya Tahun Ketiga, Nomor 2: Hal. 24 - 31.*

Yunasfi, 2007. *Sosial Forestry dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Hutan.*



LAMPIRAN

1. SK IUPHKm Kelompok Tani Hutan (KTH) LaGolla



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

**KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : SK.6895/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN
KEPADA KELOMPOK TANI HUTAN LAGOLLA SELUAS ± 345 (TIGA RATUS
EMPAT PULUH LIMA) HEKTARE PADA KAWASAN HUTAN LINDUNG
DI DESA ANABANUA KECAMATAN BARRU KABUPATEN BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Surat Nomor: 522/18/Dishut tanggal 6 Maret 2014, Bupati Barru mengajukan Usulan Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan (HKm) pada Kawasan Hutan Lindung (HL) seluas ± 346 (tiga ratus empat puluh enam) hektare untuk Kelompok Tani Hutan Lagolla di Desa Anabanua Kecamatan Barru Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi teknis sesuai dengan Berita Acara Nomor: BA.117/BPS-2/2014 tanggal 12 September 2014, permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Areal yang dinyatakan memenuhi persyaratan seluas ± 346 (tiga ratus empat puluh enam) hektare;
- c. bahwa berdasarkan hasil Risalah Pengolahan Data oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Nomor: RIS.13/WP3H-3/2015 tanggal 11 Februari 2015, setelah dipetakan kembali dan dilakukan penyesuaian batas kawasan hutan, luas areal kerja Hutan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada huruf b seluas ± 345 (tiga ratus empat puluh lima) hektare, seluruhnya berada pada kawasan Hutan Lindung;
- d. bahwa berdasarkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan Surat Keputusan Nomor: SK.185/MenLHK-II/2015 tanggal 23 Juni 2015 tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan seluas ± 1.780 (seribu tujuh ratus delapan puluh) hektare pada Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan, untuk Kelompok Tani Hutan Lagolla seluas ± 345 (tiga ratus empat puluh lima) hektare;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan peralihan Pasal 65 huruf e Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016

tentang...

tentang Perhutanan Sosial, dalam hal masa berlakunya Keputusan Menteri tentang Penetapan Areal Kerja HD dan HKm telah berakhir, Menteri menerbitkan HPHD dan IUPHKm berdasarkan hasil evaluasi;

- f. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi Penetapan Areal Kerja (PAK) Hutan Kemasyarakatan Nomor: BA.337/PKPS/PHKm/PSKL.0/10/2017 tanggal 27 Oktober 2017, luas areal kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) Kelompok Tani Hutan Lagolla seluas ± 345 (tiga ratus empat puluh lima) hektare pada Kawasan Hutan Lindung;
- g. bahwa berdasarkan Pasal 23 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Keputusan tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm);
- h. bahwa berdasarkan Amar KEEMPAT Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.351/MENLHK/SETJEN/PLA.1/7/2017 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi XII), Penundaan Pemberian Izin Baru meliputi izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu, izin penggunaan kawasan hutan dan perubahan peruntukan;
- i. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d, e, f, g dan h perlu diterbitkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) kepada Kelompok Tani Hutan Lagolla seluas ± 345 (tiga ratus empat puluh lima) hektare pada Kawasan Hutan Lindung di Desa Anabanua Kecamatan Barru Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan

Hutan...

Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 713);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.14/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 210);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN KEPADA KELOMPOK TANI HUTAN LAGOLLA SELUAS ± 345 (TIGA RATUS EMPAT PULUH LIMA) HEKTARE PADA KAWASAN HUTAN LINDUNG DI DESA ANABANUA KECAMATAN BARRU KABUPATEN BARRU PROVINSI SULAWESI SELATAN.
- KESATU : Memberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) kepada Kelompok Tani Hutan Lagolla seluas ± 345 (tiga ratus empat puluh lima) hektare pada Kawasan Hutan Lindung di Desa Anabanua Kecamatan Barru Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana daftar anggota terlampir.
- KEDUA : Letak dan batas areal kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU adalah sebagaimana tergambar dalam peta areal kerja IUPHKm pada lampiran Keputusan Menteri ini
- KETIGA : Pemberian areal kerja IUPHKm sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU dengan ketentuan:
1. tidak dapat diwariskan;
 2. bukan...

2. bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan;
 3. tidak dapat dipindahtangankan;
 4. tidak boleh mengubah status dan fungsi kawasan hutan;
 5. tidak digunakan untuk kepentingan lain diluar rencana usaha pemanfaatan;
 6. tidak melakukan usaha atau kegiatan yang bertentangan dengan fungsi kawasan hutan;
 7. tidak dapat diagunkan kecuali tanamannya; dan
 8. dilarang menanam kelapa sawit di areal IUPHKm.
- KEEMPAT** : IUPHKm sebagaimana Amar KESATU, meliputi izin usaha pemanfaatan hutan sebagai berikut:
1. Izin usaha pemanfaatan kawasan;
 2. Izin usaha pemungutan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu; dan
 3. Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan.
- KELIMA** : Terhadap areal kerja IUPHKm yang berada di dalam wilayah Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru dilarang melakukan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan pemungutan hasil hutan kayu.
- KEENAM** : Setelah diberikan IUPHKm, Pemegang Izin berhak :
1. mendapat perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran lingkungan atau pengambilalihan secara sepihak oleh pihak lain;
 2. melaksanakan usaha pemanfaatan hutan sebagaimana Amar KEEMPAT pada areal kerja IUPHKm sesuai dengan kearifan lokal dengan tidak menggunakan alat berat;
 3. mendapat manfaat dari sumber daya genetik yang ada di dalam areal kerja IUPHKm;
 4. mengembangkan ekonomi produktif berbasis kehutanan;
 5. mendapat pendampingan dalam pengelolaan HKm serta penyelesaian konflik;
 6. mendapat pendampingan kemitraan dalam pengembangan usahanya;
 7. mendapat pendampingan penyusunan rencana kerja usaha dan rencana kerja tahunan; dan
 8. mendapat perlakuan yang adil atas dasar gender ataupun bentuk lainnya
- KETUJUH** : Setelah diberikan IUPHKm, Pemegang Izin berkewajiban :
1. menjaga arealnya dari perusakan dan pencemaran lingkungan;
 2. memberi tanda batas areal kerjanya;
 3. menyusun Rencana Kerja Usaha, dan Rencana Kerja Tahunan;
 4. menyampaikan laporan pelaksanaan kepada pemberi hak atau izin;
 5. melakukan penanaman dan pemeliharaan hutan di areal kerjanya;
 6. melaksanakan tata usaha hasil hutan;
 7. membayar provisi sumber daya hutan;
 8. mempertahankan fungsi hutan; dan
 9. melaksanakan...

9. melaksanakan perlindungan hutan.
- KEDELAPAN : IUPHKm diberikan untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun dan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Desember 2017

A.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN
SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN

Ttd.

BAMBANG SUPRIYANTO
NIP. 19631004 199004 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
4. Menteri Perindustrian;
5. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
6. Gubernur Sulawesi Selatan;
7. Bupati Barru;
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
10. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
11. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung;
12. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan;
13. Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi;
14. Ketua Kelompok Tani Hutan Lagolla, di Desa Anabanua, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan
Kerjasama Teknik
Sekertariat Direktorat
Jendral Perhutanan Sosial
Dan Kemitraan Lingkungan



R. Luhur Kusumo, S.H., M.Si

2. Daftar Nama Anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) LaGolla

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN KEPADA KELOMPOK TANI HUTAN LAGOLLA SELUAS ± 345 (TIGA RATUS EMPAT PULUH LIMA) HEKTARE PADA KAWASAN HUTAN LINDUNG DI DESA ANABANUA KECAMATAN BARRU KABUPATEN BARRU PROVINSI SULAWESI SELATAN.

NOMOR : SK.6895/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2017

TANGGAL : 22 Desember 2017

DAFTAR NAMA ANGGOTA KELOMPOK TANI HUTAN LAGOLLA PEMEGANG IUPHKM DESA ANABANUA KECAMATAN BARRU KABUPATEN BARRU PROVINSI SULAWESI SELATAN

No	Nama	NIK	Alamat
1	Asikin	7311030705580001	Desa Anabanua
2	Syamsul Rijal	7311030607740001	Desa Anabanua
3	Faharuddin	7311031312660001	Desa Anabanua
4	Asdar	7311031909780001	Desa Anabanua
5	Suardin	7311032402700001	Desa Anabanua
6	Basri	7311032808940001	Desa Anabanua
7	Harianto	7311030909860002	Desa Anabanua
8	Labeddu	7311030107390022	Desa Anabanua
9	Asikin	7311033112620009	Desa Anabanua
10	Hartawan	7311030108840001	Desa Anabanua
11	Asdar	7311033112690025	Desa Anabanua
12	Sakktang	7311032708930001	Desa Anabanua
13	Agus	7311033012850001	Desa Anabanua
14	M.Halim	7311030704820003	Desa Anabanua
15	Maleng	7311032808720002	Desa Anabanua
16	Marhabang	7311032805750001	Desa Anabanua
17	Beddu Galib	7311033112600001	Desa Anabanua
18	Lacaco	7311033112580050	Desa Anabanua
19	Akmal	7311030511830003	Desa Anabanua
20	Syamsudin	7311032004760002	Desa Anabanua
21	HBD.Asis	7311032703430001	Desa Anabanua
22	Lukman	7311031008910001	Desa Anabanua
23	Lamiring	7311030107460040	Desa Anabanua
24	Abu Seri	7311032505790006	Desa Anabanua
25	Ali	7311033112440001	Desa Anabanua
26	Aliming	7311031910750002	Desa Anabanua
27	Musi	7311033112760023	Desa Anabanua
28	Kadir	7311030407750003	Desa Anabanua
29	Tamir	7311033112740044	Desa Anabanua
30	H.Hudi Galib	7311033112560002	Desa Anabanua
31	Syamsuddin	7311032107720004	Desa Anabanua
32	Yahya bin latolo	7311031204840003	Desa Anabanua
33	Mahmud	7311033112630026	Desa Anabanua
34	Ashar	7311031112660001	Desa Anabanua
35	Muh.Alibaba	7311031510710001	Desa Anabanua
36	Umar	7311030107780008	Desa Anabanua

37. St. Kurniati...

37	St.Kurniati	7311034505670001	Desa Anabanua
38	Usman	7311033112700064	Desa Anabanua
39	Muhammad Arafa	7311033112950006	Desa Anabanua
40	Muhabbareng	7311031211730001	Desa Anabanua
41	Labandu	2103013112390034	Desa Anabanua
42	Haeril	7311030612840002	Desa Anabanua
43	Alias	7311031202800003	Desa Anabanua
44	Lakalu	7311031305500001	Desa Anabanua
45	Rafiuddin	7311030702840003	Desa Anabanua
46	Mustika	7311030712750001	Desa Anabanua
47	Ismail	7311030107560205	Desa Anabanua
48	Ismawang	7311032301950002	Desa Anabanua
49	Hamka	7311031409800002	Desa Anabanua
50	Malla	7311030104590001	Desa Anabanua
51	Kamme	7311033112770041	Desa Anabanua
52	Hadar	7311033010760001	Desa Anabanua
53	Dedirisaldi	7311032404960002	Desa Anabanua
54	Hamsa	7311031804730001	Desa Anabanua
55	Lahasse	7311030107530058	Desa Anabanua
56	Juddin	7311031005660001	Desa Anabanua
57	Tahir	7311031005690003	Desa Anabanua
58	Bahri	6408083112860004	Desa Anabanua
59	Hayat	7311031207760003	Desa Anabanua
60	Lasongkeng	7311030107420017	Desa Anabanua
61	Ibrahim	7311030077620065	Desa Anabanua
62	Idrus	7311032505740001	Desa Anabanua
63	Jumardin Arsat	7311031106930003	Desa Anabanua
64	Arsat	7311031107700004	Desa Anabanua
65	Arapa	7311030508660001	Desa Anabanua
66	Halide	7311030107450040	Desa Anabanua
67	Hamza	7311033112550038	Desa Anabanua
68	Patahuddin	7311031709690001	Desa Anabanua
69	HBD.Aziz.H	2103013112280033	Desa Anabanua
70	Ardi	7311030202740001	Desa Anabanua
71	Muhiddin	7311033012600006	Desa Anabanua
72	Ladising	7311030107420042	Desa Anabanua
73	Berahima	6405081505560001	Desa Anabanua
74	Ladolla	7311030107700085	Desa Anabanua
75	Awaluddin	7311030801950003	Desa Anabanua
76	Budiman	7311030107800103	Desa Anabanua
77	Irwansya	7311031008870002	Desa Anabanua
78	Dahlan	7311031509650003	Desa Anabanua
79	Sainuddin	7311033112520002	Desa Anabanua
80	Supardi	7311031005790002	Desa Anabanua
81	Masse	7311030107830003	Desa Anabanua
82	Anismawati	7311034507820002	Desa Anabanua
83	Sainudin	7311033112630022	Desa Anabanua
84	Yusuf	7311032404870001	Desa Anabanua
85	Abdul Aziz	7311032901930001	Desa Anabanua
86	Safiyah	7311037112300030	Desa Anabanua
87	Isaba	7311037112510029	Desa Anabanua

88. Sabenu...

88	Sabenu	7311037112460006	Desa Anabanua
89	Arfina	7311034807930002	Desa Anabanua
90	Ikanna	7311034212600003	Desa Anabanua
91	Erika	7311034704930003	Desa Anabanua
92	Ihawa	7311034107580084	Desa Anabanua
93	Yangkatang	7311035101660001	Desa Anabanua
94	Tammase	7311034501830001	Desa Anabanua
95	Amina	7311034107650082	Desa Anabanua
96	Adiba	7311034107660010	Desa Anabanua
97	Hermawati	7311037112740034	Desa Anabanua
98	Idapi	7311034107390020	Desa Anabanua
99	Imange	7306037112630003	Desa Anabanua
100	Mardawiya	7311035507730003	Desa Anabanua
101	Herman	7311032612940003	Desa Anabanua
102	Iraja	7311034107500094	Desa Anabanua
103	Marhana	7311034107570049	Desa Anabanua
104	Isani	7311037112580034	Desa Anabanua
105	Suleha	7311034405690006	Desa Anabanua
106	Nurung	7311034107520048	Desa Anabanua
107	Isanang	7311037112490017	Desa Anabanua
108	Nasrullah	7311031007760003	Desa Anabanua
109	Firman	7311032401750001	Desa Anabanua
110	Yunus	7311033112690040	Desa Anabanua
111	Asrul	7311030503960003	Desa Anabanua
112	Suhra	7311034107490040	Desa Anabanua
113	Semmadang	7311033107510001	Desa Anabanua
114	Ibintang	7311036705430001	Desa Anabanua
115	Ijuhe	7311036104430003	Desa Anabanua
116	Ruhani	7311037112630072	Desa Anabanua
117	Cagga	7311030512630001	Desa Anabanua
118	Nurhayati	7311034107700004	Desa Anabanua
119	Bahril	7311033112650045	Desa Anabanua
120	Sahnun	7311030501620001	Desa Anabanua
121	Nur Sehat	7306081512880003	Desa Anabanua
122	Jahima	7311030107630093	Desa Anabanua
123	Saharudding	7311030107770100	Desa Anabanua
124	Amir	7311031001820005	Desa Anabanua
125	Ramli	7311020506800002	Desa Anabanua
126	Akmal	7311031109740004	Desa Anabanua
127	Lamaru	7311030107520054	Desa Anabanua
128	Nurdalle	7311034507790003	Desa Anabanua
129	Arifin	7311020107450009	Desa Anabanua
130	Ansar	7311030112750002	Desa Anabanua
131	Gustan	7311030307920002	Desa Anabanua
132	Hadar	7311033010760001	Desa Anabanua
133	Lalolo	7311030107490034	Desa Anabanua
134	Syamsualam	7311030107720092	Desa Anabanua
135	Edi Gunawan	7311031711900004	Desa Anabanua
136	Sudirman	7311031708880003	Desa Anabanua
137	Lajubu	7311030206580001	Desa Anabanua
138	Iseneng	7311037112550054	Desa Anabanua

139. Santur...

139	Santur	7311033112700017	Desa Anabanua
140	Rustan	7311033112770036	Desa Anabanua
141	Dirman	7311031203870001	Desa Anabanua
142	Ladure	7311033112590013	Desa Anabanua
143	Mappeasse Sbnng	7311030210660001	Desa Anabanua
144	Suddin	7311031507800004	Desa Anabanua
145	Amaliyah Saputri	7311034607920004	Desa Anabanua
146	Yasir	7311030703810002	Desa Anabanua
147	Damrin	7311033112700062	Desa Anabanua
148	Lasikki	7311033112750043	Desa Anabanua
149	Ibrahim	7311030107590040	Desa Anabanua
150	M.Hatta	7311033112750033	Desa Anabanua
151	Latalle	7311033112490009	Desa Anabanua
152	Latahang	7311030107680087	Desa Anabanua
153	Rahmat	7408060507880003	Desa Anabanua
154	A.Hulong	7311033112770043	Desa Anabanua
155	Kettaribe	7311033112450010	Desa Anabanua
156	Rauf	7311033012780004	Desa Anabanua
157	Manra	7311033112520019	Desa Anabanua
158	Usman	7311030501860004	Desa Anabanua
159	Sellaha	7311030107540044	Desa Anabanua
160	Kamming	7311030107580068	Desa Anabanua
161	Suardi	7311032101600001	Desa Anabanua
162	Hamzah	7311012605730001	Desa Anabanua
163	Imamang	7311037112330003	Desa Anabanua
164	Mirnawati	7311036207910004	Desa Anabanua
165	Mida	7311034107790053	Desa Anabanua
166	Salemma	7311037112680058	Desa Anabanua
167	Syamsia	7311035512680002	Desa Anabanua
168	Duhari	7311037112800016	Desa Anabanua
169	Mina	7311036709770002	Desa Anabanua
170	Hasni	7311035503710002	Desa Anabanua
171	Amirudding	7311030908140004	Desa Anabanua
172	Haris	7311030202820001	Desa Anabanua
173	Muhammad Reski	7311030511810003	Desa Anabanua
174	Budiman	7311031702790002	Desa Anabanua
175	Saini	7311030501630002	Desa Anabanua
176	Mida	7311034107790053	Desa Anabanua
177	Husman	7311031504800003	Desa Anabanua
178	Arham	7311021610800001	Desa Anabanua
179	Akbar	7311033012810001	Desa Anabanua
180	Taupik Wollong	7311022401650003	Desa Anabanua
181	Syardiana	7311035005770007	Desa Anabanua
182	Hamsiah	7311037112580037	Desa Anabanua
183	Kambe	7311036210570001	Desa Anabanua
184	Mina	7311014107650008	Desa Anabanua

185	Malang	7305014700540001	Desa Anabanua
186	Sumarni	7311035804920005	Desa Anabanua
187	Lasita	7311030107440023	Desa Anabanua

A.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN
SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN

Ttd.

BAMBANG SUPRIYANTO
NIP. 19631004 199004 1 001



3. Susunan Struktur Kelompok Tani Hutan (KTH) LaGolla

9



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
KECAMATAN BARRU
DESA ANABANUA

KEPUTUSAN HASIL RAPAT MUSYAWARAH AWAL

DESA ANABANUA

Berdasarkan Musyawarah Awal yang di laksanakan pada hari Jumat Tanggal Dua Puluh Dua Februari Tahun Dua Ribu Tiga Belas oleh Masyarakat Tani Dusun Banga Bangae Desa Anbanua Kecamatan Barru memutuskan sebagai berikut:

1. Membentuk Kelompok Tani,Hutan
Nama Kelompok Tani Hutan : La Golla
Alamat : Dusun Banga Bangae Desa Anabanua
Terbentuk pada Tanggal : 22 Februari 2013
Jumlah Anggota dan Pengurus : 50 Orang
Menetapkan Susunan Pengurus Kelompok Tani sebagai berikut:
Ketua : Azikin
Sekretaris : Syamsu Rijal
Bendahara : Paharuddin
Tugas dan Tanggung Jawab masing-masing pengurus diatur berdasarkan petunjuk yang telah ditetapkan.
3. Menetapkan Sekretariat Kelompok Tani di Rumah Ketua Kelompok Tani.
4. Hal-hal yang berhubungan dengan Organisasi kelompok Tani Tersebut di atas dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan diatur berdasarkan musyawarah selanjutnya.

Demikian hasil musyawarah awal ini dibuat untuk diketahui.

Banga Bangae, 22 Februari 2013

PENGURUS KELOMPOK TANI HUTAN

Ketua,	Sekretaris,	Bendahara,
 AZIKIN	 SYAMSU RIJAL	 PAHARUDDIN
	Mengetahui,	
	 Kepala Desa Anabanua SAHNUN	



**STPUKTUR SUSUNAN KELOMPOK TANI HUTAN
" LAGOLLA "**

Lokasi : Banga Bangae
 Desa : Anabanua
 Kecamatan : Barru
 Kabupaten : Barru
 Ketua : Azikin
 Sekretaris : Syamsu Rijal
 Bendahara : Paharuddin

- | | | | |
|---------|------------------|-----------------|-------------|
| Anggota | 1 Asdan | 17 Umar | 33 Berahima |
| | 2 Suardin | 18 St Kurniati | 34 Ladolla |
| | 3 Asdan | 19 Muh. arafah | 35 Bu Luman |
| | 4 Sakhatang | 20 Muhabbaring | 36 Masse |
| | 5 Agus | 21 Lakali | 37 Saqiyah |
| | 6 Basri | 22 Itacod | 38 Erika |
| | 7 Maleng | 23 Mustika | 39 Sabenu |
| | 8 Marhababg | 24 Ismail | 40 Suhra |
| | 9 Laco Co | 25 Malla | 41 Amin |
| | 10 Syamsuddin | 26 Kame | 42 Rambi |
| | 11 ABD ASIS | 27 Hadar | 43 Sudoman |
| | 12 Kadur | 28 Dedi Resalti | 44 Gustan |
| | 13 Tamir | 29 Hamsa | 45 Hadar |
| | 14 H. Hudi Galib | 30 La Hasse | 46 Isenay |
| | 15 Beddu Galib | 31 Judding | 47 Isentay |
| | 16 Sam Sudun | 32 Halide | 48 Laduree |
| | 49 Ashan | 50 landing | 52 M. Hatta |

Ketua

AZIKIN

Sekretaris

SYAMSU RIJAL

Bendahara

PAHARUDDIN

Mengetahui,

Kepala Desa Anabanua

SAHUNUN

Penyuluh Kehutanan

MISFARIDA, S.Hut
 NIP.196701021998032002

4. Kusioner Penelitian

DAFTAR PERTANYAAN
PARTISIPASI KELOMPOK TANI HUTAN LA GOLLA
DALAM PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN (HKm)
DESA ANABANUA KABUPATEN BARRU

Identitas Responden

Hari/Tanggal wawancara :.....

Nama Responden :.....

Alamat :.....

Umur :.....

Pendidikan :.....

A. Partisipasi Keputusan

1. Apakah sering diadakan pertemuan atau rapat kegiatan?

- a. Ya/sering (3)
- b. Kadang-kadang (2)
- c. Tidak (1)

Alasan :.....

2. Apakah bapak /ibu sering memberikan usulan pada saat pertemuan atau rapat?

- a. Ya/sering (3)
- b. Kadang-kadang (2)
- c. Tidak (1)

Alasan :.....

3. Apakah bapak/ibu menyampaikan masalah-masalah atau kekurangan yang ada dalam kegiatan?

- a. Ya/sering (3)
- b. Kadang-kadang (2)
- c. Tidak (1)

Alasan :.....

4. Apakah Bapak /ibu sering menyampaikan solusi ketika ada masalah dalam kegiatan di pertemuan?

- a. Ya/sering (3)
- b. Kadang-kadang (2)
- c. Tidak (1)

Alasan :.....

5. Apakah bapak/ibu sering hadir ketika diadakan pertemuan?

- a. Ya/sering (3)
- b. Kadang-kadang (2)
- c. Tidak (1)

Alasan :.....

B. Partisipasi Pelaksanaan

1. Apakah Bapak /ibu sering ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan?

- a. Ya/sering (3)
- b. Kadang-kadang (2)
- c. Tidak (1)

Alasan :.....

2. Apakah Bapak /ibu sering ikut serta dalam kegiatan yang telah dirapatkan?

- a. Ya/sering (3)
- b. Kadang-kadang (2)
- c. Tidak (1)

Alasan :.....

3. Apakah Bapak /ibu sering ikut serta dalam kegiatan pengadaan bibit?

- a. Ya/sering (3)
- b. Kadang-kadang (2)
- c. Tidak (1)

Alasan :.....

4. Apakah Bapak /ibu sering ikut serta dalam kegiatan penanaman bibit?

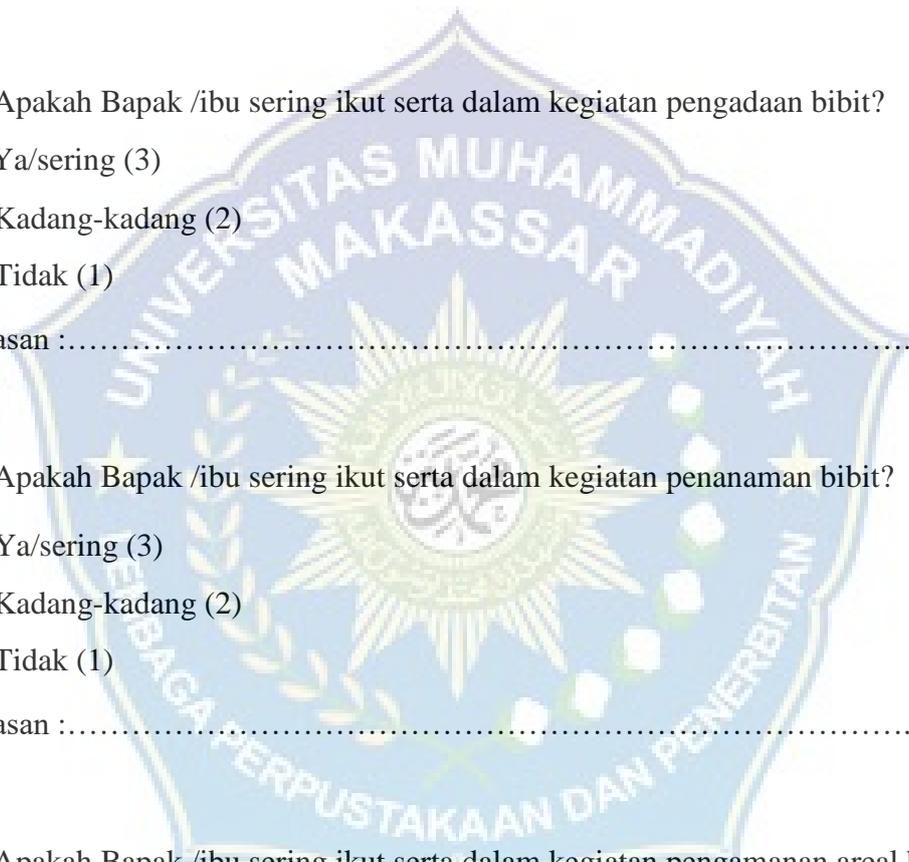
- a. Ya/sering (3)
- b. Kadang-kadang (2)
- c. Tidak (1)

Alasan :.....

5. Apakah Bapak /ibu sering ikut serta dalam kegiatan pengamanan areal hutan?

- a. Ya/sering (3)
- b. Kadang-kadang (2)
- c. Tidak (1)

Alasan :.....



C. Partisipasi Pemanfaatan

1. Apakah Bapak /ibu sering ikut serta dalam kegiatan pembukaan wilayah hutan?

- a. Ya/sering (3)
- b. Kadang-kadang (2)
- c. Tidak (1)

Alasan :

2. Apakah Bapak /ibu sering ikut serta dalam kegiatan penetapan petak kerja?

- a. Ya/sering (3)
- b. Kadang-kadang (2)
- c. Tidak (1)

Alasan :

3. Apakah bapak/ibu pernah mengambil tumbuhan obat nya?

- a. Ya/sering (3)
- b. Kadang-kadang (2)
- c. Tidak (1)

Alasan :

4. Apakah Bapak /ibu sering ikut serta dalam kegiatan pembuatan rencana kerja?

- a. Ya/sering (3)
- b. Kadang-kadang (2)
- c. Tidak (1)

Alasan :

5. Apakah Bapak/ibu sering ikut serta dalam menjalankan program kerja yang telah direncanakan?

- a. Ya/sering (3)
- b. Kadang-kadang (2)
- c. Tidak (1)

Alasan :.....

D. Partisipasi Evaluasi

1. Apakah Bapak /ibu sering ikut serta dalam kegiatan yang telah direncanakan?

- a. Ya/sering (3)
- b. Kadang-kadang (2)
- c. Tidak (1)

Alasan :.....

2. Apakah Bapak /ibu sering ikut serta dalam kegiatan persiapan lahan dan pemanenan?

- a. Ya/sering (3)
- b. Kadang-kadang (2)
- c. Tidak (1)

Alasan :.....

3. Apakah bapak/ibu sering melakukan pemeliharaan atau perawatan setelah penanaman?

- a. Ya/sering (3)
- b. Kadang-kadang (2)
- c. Tidak (1)

Alasan :.....

4. Apakah bapak/ibu sering ikut serta dalam proses pemanenan?

a. Ya/sering (3)

b. Kadang-kadang (2)

c. Tidak (1)

Alasan :

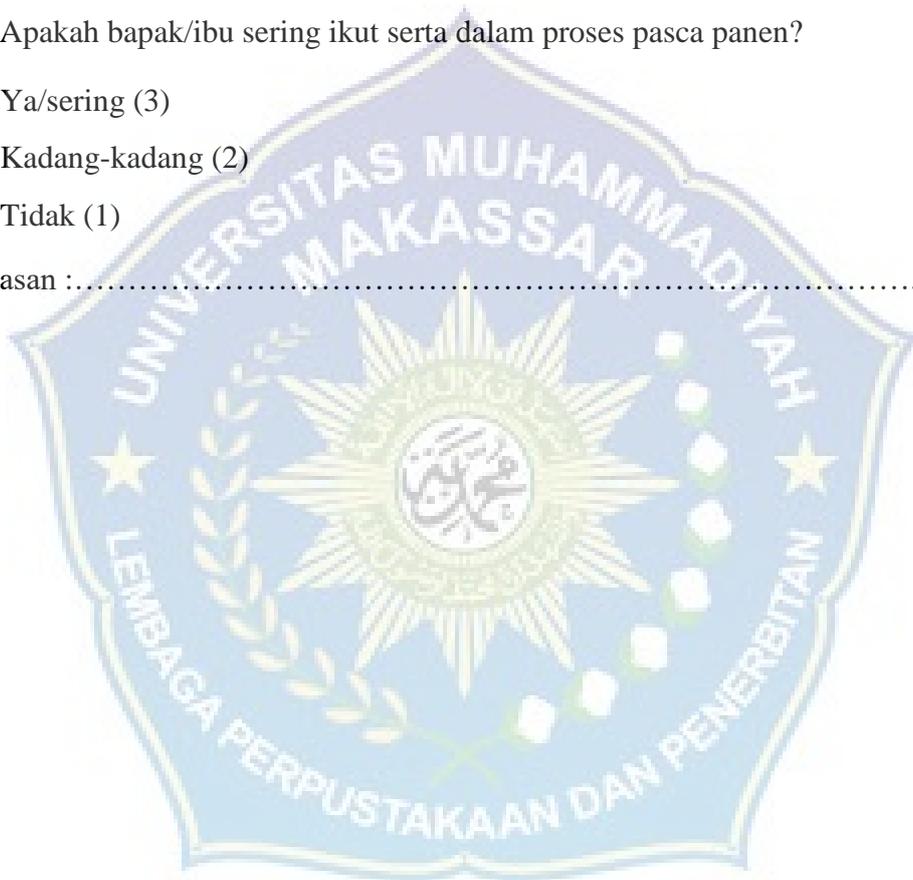
5. Apakah bapak/ibu sering ikut serta dalam proses pasca panen?

a. Ya/sering (3)

b. Kadang-kadang (2)

c. Tidak (1)

Alasan :



5. Skor Partisipasi keputusan

No	Kusioner	Nomor Responden 1-57									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	a. partisipasi masyarakat dalam mengadakan pertemuan atau rapat kerja	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	ya / sering (3)	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	kadang-kadang (2)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	tidak pernah (1)	51	52	53	54	55	56	57			
	3	3	3	3	3	2	2				
2	b. partisipasi masyarakat dalam memberikan usulan pada saat rapat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	ya / sering (3)	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	kadang-kadang (2)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
tidak pernah (1)	51	52	53	54	55	56	57				
	2	2	2	2	2	2	2				
3	c. partisipasi masyarakat dalam menyampaikan masalah dalam kegiatan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	ya / sering (3)	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	kadang-kadang (2)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
tidak pernah (1)	51	52	53	54	55	56	57				
	3	2	2	2	2	2	2				

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	d.partisipasi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	masyarakat dalam	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	menyampaikan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	solusi dalam	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	pertemuan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	ya / sering (3)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	kadang-kadang (2)	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	tidak pernah (1)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2
		51	52	53	54	55	56	57			
		2	2	2	2	2	2	2			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	e. partisipasi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	masyarakat dalam	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	menghadiri	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5	pertemuan	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	ya / sering (3)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	kadang-kadang (2)	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	tidak pernah (1)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		51	52	53	54	55	56	57			
		3	3	3	3	3	2	2			

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, (2023)

6. Skor Partisipasi pelaksanaan

No	Kusioner	Nomor Responden 1-57									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	a. partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan ya / sering (3) kadang-kadang (2) tidak pernah (1)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		51	52	53	54	55	56	57			
3	3	3	3	3	2	2					
2	b. partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang dirapatkan ya / sering (3) kadang-kadang (2) tidak pernah (1)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
51	52	53	54	55	56	57					
3	2	2	2	2	2	2					
3	c. partisipasi masyarakat dalam pengadaan bibit ya / sering (3) kadang-kadang (2) tidak pernah (1)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
51	52	53	54	55	56	57					
2	2	2	2	2	2	2					

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	d. partisipasi masyarakat dalam kegiatan penanaman bibit	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	ya / sering (3)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	kadang-kadang (2)	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	tidak pernah (1)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		51	52	53	54	55	56	57			
		3	3	3	3	2	2	2			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	e. partisipasi masyarakat dalam pengamanan areal hutan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	ya / sering (3)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	kadang-kadang (2)	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	tidak pernah (1)	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2
		51	52	53	54	55	56	57			
		2	2	2	2	2	2	2			

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, (2023)

7. Skor Partisipasi Pemanfaatan

No	Kusioner	Nomor Responden 1-57										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	a. partisipasi masyarakat dalam kegiatan wilayah hutan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
		31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
		ya / sering (3)	3	3	3	3	3	3	3	3	2	
		kadang-kadang (2)	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		tidak pernah (1)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
			51	52	53	54	55	56	57			
	2	2	2	2	2	2	2					
2	b. partisipasi masyarakat dalam kegiatan penetapan petak kerja	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		3	3	3	3	3	3	3	3	3		
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
		3	3	3	3	3	3	3	3	3		
		31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
		ya / sering (3)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
		kadang-kadang (2)	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		tidak pernah (1)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
			51	52	53	54	55	56	57			
	3	2	2	2	2	2	2					
3	c. partisipasi masyarakat dalam mengambil tumbuhan obat	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		3	3	3	3	3	3	3	3	3		
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
		3	3	3	3	3	3	3	3	2		
		31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
		ya / sering (3)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		kadang-kadang (2)	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		tidak pernah (1)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
			51	52	53	54	55	56	57			
	2	2	2	2	2	2	2					

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	d. partisipasi masyarakat dalam mengambil tumbuhan obat	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	ya / sering (3)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	kadang-kadang (2)	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	tidak pernah (1)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		51	52	53	54	55	56	57			
		3	3	3	3	2	2	2			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	e. partisipasi masyarakat dalam menjalankan program kerja	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	ya / sering (3)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	kadang-kadang (2)	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	tidak pernah (1)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		51	52	53	54	55	56	57			
		3	3	3	3	3	3	2			

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, (2023)

8. Skor Partisipasi Evaluasi

No	Kusioner	Nomor Responden 1-57										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	a. partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang telah direncanakan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
		31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
		ya / sering (3)	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		kadang-kadang (2)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		tidak pernah (1)	51	52	53	54	55	56	57			
	3	3	3	2	2	2	2					
2	b. partisipasi masyarakat dalam kegiatan persiapan lahan pemanenan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
		31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
		ya / sering (3)	3	3	3	3	3	3	3	2	2	
		kadang-kadang (2)	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		tidak pernah (1)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	51	52	53	54	55	56	57					
	2	2	2	2	2	2	2					
3	c. partisipasi masyarakat dalam melakukan pemeliharaan penanaman	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
		31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
		ya / sering (3)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
		kadang-kadang (2)	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		tidak pernah (1)	3	3	3	3	3	3	3	2	2	
	51	52	53	54	55	56	57					
	2	2	2	2	2	2	2					

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	d. partisipasi	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	masyarakat dalam	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	proses pemanenan	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	ya / sering (3)	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	kadang-kadang (2)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	tidak pernah (1)	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		51	52	53	54	55	56	57			
		2	2	2	2	2	2	2			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	e. partisipasi	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	masyarakat dalam	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	proses pasca panen	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
5		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	ya / sering (3)	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	kadang-kadang (2)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	tidak pernah (1)	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		51	52	53	54	55	56	57			
		3	2	2	2	2	2	2			

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, (2023)

9. Dokumentasi Penelitian











10. Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Mal Pelayanan Publik Masiga Lt. 1-3 Jl. Iskandar Unru Telp. (0427) 21662, Fax (0427) 21410
<http://izinonline.barrukab.go.id> : e-mail : barrudpmpstpk@gmail.com .Kode Pos 90711

Barru, 19 Juni 2023

Nomor : 343/IP/DPMPSTP/VI/2023
Lampiran :
Hal : Izin/Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Desa Anabanua Kec. Barru Kab.
Barru
di-
Tempat

Berdasarkan Surat Kepala DPMPSTP Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 19297/S.01/PTSP/2023 tanggal 15 Juni 2023 perihal tersebut di atas, maka Mahasiswa (i) / Peneliti / Dosen / Pegawai di bawah ini :

Nama : MUH. YUSRIL YUNUS
Nomor Pokok : 15951100419
Program Studi : Kehutanan
Perguruan Tinggi : UNISMUH Makassar
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
Alamat : BTN Sinar Bombong Kel. BontoSunggu Kec. Bajeng Kab. Gowa

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal 20 Juni 2023 s/d 28 Juli 2023, dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**PARTISIPASI KELOMPOK TANI HUTAN LA GOLLA DALAM PENGELOLAAN HUTAN
KEMASYARAKATAN (HKM) DESA ANABANUA KABUPATEN BARRU**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1(satu) eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta kepada Saudara (i) untuk memberikan bantuan fasilitas seperlunya.
Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

a.n. Kepala Dinas,
**Kabid. Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan,**


H. MUSTAMAR, S.Sos, M.M
Pangkat: Pembina, IV/a
NIP. 19670415 198810 1003

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth.
1. Bapak Bupati (sebagai laporan),
2. Kepala Bappelitbangda Kab. Barru;
3. Camat Barru Kab. Barru;
4. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
5. Mahasiswa yang bersangkutan;

11. Surat Keterangan Bebas Plagiat



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865388

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Muh. Yusril Yunus

Nim : 105951100419

Program Studi: Kehutanan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	25 %	25 %
3	Bab 3	6 %	10 %
4	Bab 4	6 %	10 %
5	Bab 5	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 14 Agustus 2023
Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



M. Yusril Yunus, M.P.
NIM. 204 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593, fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

BAB I muh yusril yunus 105951100419

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX



INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

123dok.com

Internet Source

2%

2

docplayer.info

Internet Source

2%

3

tatakelolahutan.net

Internet Source

2%

4

ejournal.unesa.ac.id

Internet Source

2%

5

repositori.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

BAB II muh yusril yunus 105951100419

ORIGINALITY REPORT

25% SIMILARITY INDEX
25% INTERNET SOURCES
9% PUBLICATIONS
10% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.unhas.ac.id Internet Source	7%
2	digilib.unila.ac.id Internet Source	5%
3	repository.unhas.ac.id Internet Source	3%
4	repository.unja.ac.id Internet Source	3%
5	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	3%
6	pusdiklat.bp2sdm.menlhk.go.id Internet Source	2%
7	Submitted to Universitas Khairun Student Paper	2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

BAB III muh yusril yunus 105951100419

ORIGINALITY REPORT

6%

SIMILARITY INDEX



6%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

ejournal.uin-suka.ac.id

Internet Source

2%

2

Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Student Paper

2%

3

repository.uksw.edu

Internet Source

2%

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

On



BAB IV muh yusril yunus 105951100419

ORIGINALITY REPORT

6% SIMILARITY INDEX
2% INTERNET SOURCES
4% PUBLICATIONS
0% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1 Timotius Titus Tahoni, Yohanes Pebrian Vianney Manbur. "Peran Penyuluh Pertanian dalam Peningkatan Produktivitas Kelompok Tani di Desa Oesoko Kecamatan Insana Utara", AGRIMOR, 2020
Publication 4%
- 2 e-journals.unmul.ac.id
Internet Source 2%

Exclude quotes On Exclude matches < 2%
Exclude bibliography On

BAB V muh yusril yunus 105951100419

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



Exclude quotes

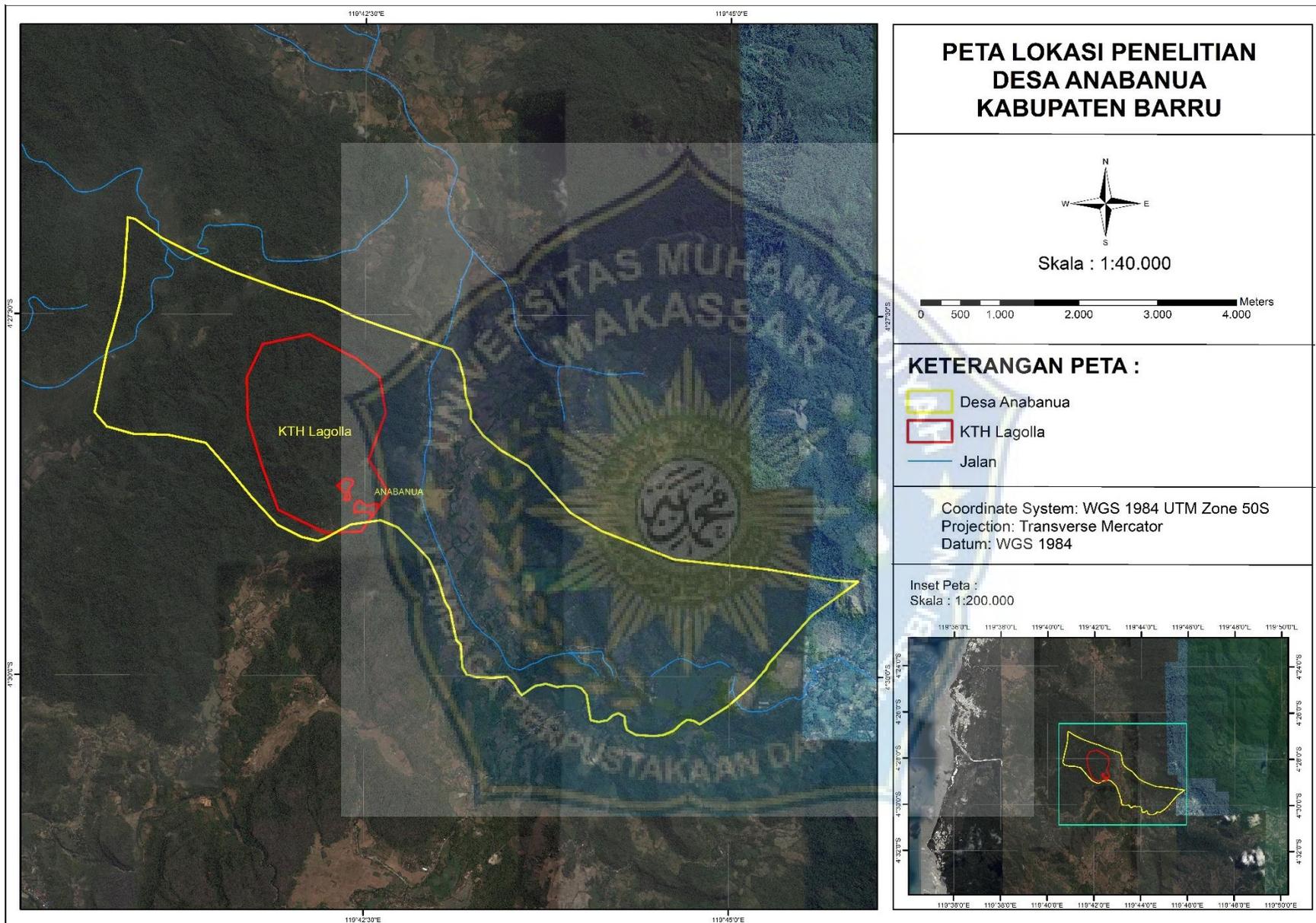
Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography



12. Peta Lokasi Penelitian



RIWAYAT HIDUP



Muh Yusril Yunus Lahir di Makassar Tanggal 12 Desember 2000. Penulis merupakan anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan Ayahanda Muh Yunus dan Ibunda St.Salma, T, Penulis mengikuti Pendidikan formal pada tahun 2006 di Tk Aisyah Jatia dan lulus Pada tahun 2007. Masuk SD INPRES PARE-PARE tahun 2007 dan selesai pada tahun 2013. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan di SMP NEGERI 1 PALLANGGA dan selesai pada tahun 2016. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan di SMA NEGERI 2 GOWA dan selesai pada tahun 2019.

Pada tahun 2019 penulis melanjutkan Pendidikan di universitas Muhammadiyah makassar strata 1 (S1) dan lulus pada Jurusan kehutanan, Fakultas Pertanian, dan pada tahun 2023 akan menyelesaikan studinya dengan judul skripsi “Partisipasi Kelompok Tani Hutan LaGolla dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Desa Anabanua Kabupaten Barru”

Pengalaman organisasi : Kaderisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Komisariat Pertanian. Wakil Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Kehutanan (HMK-FP) periode 2021-2022.